

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DITINJAU DARI  
HUKUM ISLAM DAN HAM**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Dalam Ilmu Syari'ah**



**Oleh:**

**RAHMA NURLINDA SARI**

**NPM. 1421010086**

**Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1440 H/2018 M**

# **PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HAM**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh:**

**RAHMA NURLINDA SARI  
NPM. 1421010086**

**Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)**

**Pembimbing I : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.  
Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1440 H / 2018 M**

**ABSTRAK**  
**PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA**  
**DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HAM**

Oleh  
**Rahma Nurlinda Sari**

Manusia pada dasarnya membutuhkan pendamping dalam hidupnya, baik untuk menyempurnakan agamanya, berbagi cinta, kasih, melanjutkan keturunan dan agar tidak jatuh pada kemaksiatan, maka harus diikat dengan perkawinan yang sah. Dalam Al-qur'an disebutkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, termasuk kedalamnya manusia. Ada perbedaan yang *urgen*, seperti dalam pernikahan beda agama. Bagi manusia sekarang ini, dunia tidak lagi hanya "selebar daun kelor", tetapi sudah meluas menjadi seluas bola dunia itu sendiri. Dalam kondisi pergaulan seperti itu, maka terjadinya perkawinan antar suku, antar ras, antar golongan dan antar agama, bukanlah sesuatu yang mustahil untuk terjadi perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masing-masing berbeda agamanya di Indonesia sudah sering terjadi, hal itu akan tidak sampai pada tujuan perkawinan.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan beda agama di Indonesia, bagaimana tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap pernikahan beda agama, serta apa persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan Hak Asasi Manusia terhadap pernikahan beda agama.

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui secara mendalam tentang pernikahan beda agama menurut hukum Islam dan ingin mengetahui bagaimana Hak Asasi Manusia memandang larangan pernikahan beda agama dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan Hak Asasi Manusia terhadap pernikahan beda agama.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat penelitian hukum yuridis normatif. Yang bertujuan untuk menganalisis berdasarkan hukum Islam dan HAM terhadap pernikahan beda agama sehingga skripsi ini bersifat deskriptif analitis menghimpun dan mendeskripsikan data-data yang berupa undang-undang, buku, dan literatur yang sesuai dengan objek yang dibahas yaitu pernikahan beda agama di Indonesia dalam pandangan hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.

Hasil penelitian ini bahwa nikah beda agama dalam pandangan hukum Islam tidak diperbolehkan/dilarang karena menyangkut perbedaan keimanan, kepercayaan, dan keyakinan. Sedangkan HAM juga melarang adanya perkawinan beda agama, karena semua hak dan kebebasan yang terumus dalam deklarasi tunduk pada syariat atau hukum Islam, satu-satunya ukuran mengenai Hak Asasi Manusia, adalah syariat Islam.

Persamaan dari pandangan keduanya yaitu sama-sama menghargai nikah beda agama karena nikah termasuk sarana untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia diatas bumi.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol Hi Endro Suratmin Sukarame andar Lampung Telp. (0721) 703278

**PERSETUJUAN**

Nama : Rahma Nurlinda Sari  
NPM : 1421010086  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah  
Judul : PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HAM

**MENYETUJUI**

Untuk di munaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqasah Fakultas Syari'ah Universitas Islam  
Negeri Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.**  
**NIP. 197403072000121000**

  
**Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**  
**NIP. 197304142000032002**

**Ketua Jurusan**

  
**Marwin, S.H., M.H.**  
**NIP. 197501292000031001**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol Hi Endro Suratmin Sukaramendrar Lampung Telp. (0721) 703278

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **Pernikahan Beda Agama di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam dan HAM** disusun oleh **Rahma Nurlinda Sari NPM. 1421010086**, Program Studi: **Al-Akhwal Al-Syakhsyiyah**, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syaria'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **07 November 2018**.

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Marwin, S.H., M.H.** (.....)

**Sekretaris : Dani Amran Hakim, S.H., M.H.** (.....)

**Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.** (.....)

**Penguji II : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.** (.....)

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Syaria'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 197009011997031002**

## MOTTO

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ  
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ  
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ  
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Kementerian Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Ummul Mukminin)

## PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepada Allah swt, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. Oleh karna itu saya Rahma Nurlinda Sari sebagai penulis skripsi ini mempersembahkan kepada :

1. Kedua orang tua, ayahandaku Sutrisno dan ibundaku Anis Nurlaili tercinta yang senantiasa selalu mencurahkan kasih sayangnya dalam mendidik dan membesarkanku, kesabaran dan limpahan cinta yang tiada usai dalam mendo'akan dan memotivasi dalam meraih keberhasilanku.
2. Kakak kandungku tersayang M.Khafid, beserta kakak iparku tercinta Nina Agustina dan adik-adikku Fitriana Trisna Dewi, M.Rafi'i Amrullah yang selalu mendukung dengan menebar senyum untuk kesuksesanku.
3. Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan do'a sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan sesuai harapan.
4. Teman-teman seperjuanganku jurusan Al-Syakhsiyyah angkatan 2014 dalam menuntut ilmu, khususnya yang telah berbagi tawa dan tangis dalam merangkai impian.

## RIWAYAT HIDUP

Rahma Nurlinda Sari adalah nama penulis, dibesarkan di Bandar Lampung, Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Lahir pada tanggal 10 Maret 1996, Putri kedua dari empat bersaudara, pasangan dari Bapak Sutrisno dan Ibu Anis Nurlali.

Riwayat pendidikan penulis yaitu :

1. Sekolah Dasar (SD) Negri 2 Campang Raya, Campang Raya Bandar Lampung. Lulus pada Tahun 2008.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Utama 3 Pahoman, Bandar Lampung. Lulus pada Tahun 2011.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Perintis 2 Palapa, Bandar Lampung. Lulus pada Tahun 2014
4. Melanjutkan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil jurusan Al-Ahkwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga) pada Tahun 2014
5. Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan puji syukur atas nikmat yang Allah Swt berikan, serta berkat dorongan keluarga, ayah dan ibu tercinta, penulis memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah jurusan Al-Ahkwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga) pada tahun 2014.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HAM” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw, dan juga keluarga, sahabat, serta pengikut-pengikutnya yang setia. Semoga mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) jurusan Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu syari'ah.

Atas terselesaikannya skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ungkapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Alamsyah, S. Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah serta para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

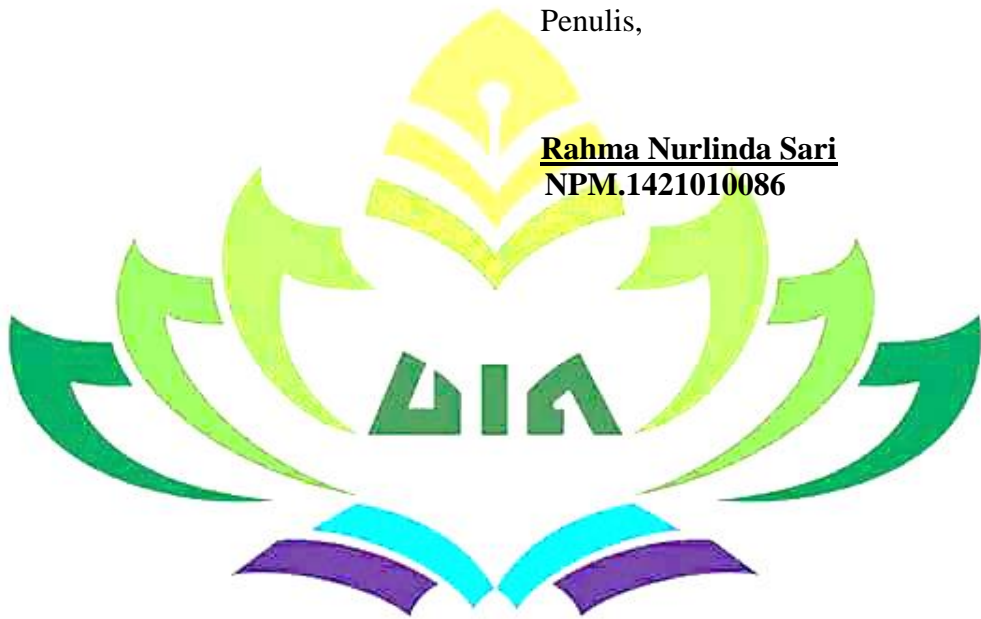
3. Bapak Marwin, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A selaku pembimbing I, Ibu Yufi Wiyos Rini, M.S selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Seluruh Dosen, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan membimbing selama mengikuti perkuliahan.
6. Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan dan hubungannya dengan akademik.
7. Teman-teman seperjuanganku Fakultas Syari'ah Angkatan 2014, serta adik-adik jurusan Al-akhwal Al-Syakhsiyyah khususnya.
8. Sahabat-sahabatku tercinta Nia Khairunisa,Amd.Kep., Demy Meliya,.S.E., Ovilia Harisma Putri,.S.H., Olivia Yulita Putri,S.Ak, Jaziella Huwaida,.S.Ak, Salsabila Ruhiyat,.S.pd, Jani Pratiwi, Jana Pratiwi, Della Laras, yang selalu memberi semangat dan motivasi.
9. Kelompok KKN 97 BumiRestu kec.Palas Kalianda terkhusus, Rizki Khairul S.H., Meli Apriyani S.E, Septiana Dewi S.Ag. yang selalu setia menemani, mendengar keluh kesahku selama ini dan selalu memotivasi serta terus memberi semangat hingga tugas akhirku selesai.
10. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku. *Jazakumullah*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran, guna melengkapi tulisan ini. Akhirnya diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman.

Bandar Lampung, 15 Oktober 2018

Penulis,

**Rahma Nurlinda Sari**  
**NPM.1421010086**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
F. Metode Penelitian .....	11

### BAB II PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM HUKUM ISLAM DAN HAM

A. Pernikahan Beda Agama dalam Hukum Islam .....	15
1. Pengertian Pernikahan .....	19
2. Dasar Hukum Melakukan Perkawinan .....	27
3. Anjuran untuk Memilih Pasangan .....	29
4. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan .....	31
5. Tujuan Pernikahan .....	36
6. Larangan-Larangan Pernikahan .....	38
B. Pernikahan Beda Agama dalam Hak Asasi Manusia .....	44
1. Pengertian HAM .....	46
2. Pengertian Pernikahan dalam HAM .....	48
3. HAM di Indonesia .....	50
4. HAM dalam Islam .....	53

### BAB III PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INONESIA

A. Pernikahan Beda Agama dalam Hukum Indonesia .....	56
B. Pernikahan Beda Agama dalam Hukum Positif .....	66
1. Hukum Pernikahan yang berlaku di Indonesia .....	67
2. Gambaran Pernikahan Beda Agama di Indonesia .....	75
3. Pencatatan Pernikahan Beda Agama .....	80



#### **BAB IV ANALISIS**

A. Analisis Hukum Islam terhadap Pernikahan Beda Agama .....	84
B. Pandangan HAM terhadap Pernikahan Beda Agama .....	90
C. Persamaan dan Perbedaan Hukum Islam Dan HAM terhadap Pernikahan Beda Agama .....	93

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	96

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi dan untuk menghindari kesalah pahaman tentang judul skripsi ini, maka penulis akan menguraikan terlebih dahulu arti dari judul skripsi ini yang akan di bahas. Judul skripsi ini adalah : **“Pernikahan beda Agama di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam dan HAM”** . Adapun istilah-istilah dari judul tersebut adalah sebagai berikut:

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Pernikahan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh penganut satu agama dengan penganut agama yang lain. Sebagai contoh seorang pria atau wanita yang beragama Islam berkawin dengan pria atau wanita yang beragama selain Islam.<sup>3</sup>

Tinjauan menurut bahasa berasal dari kata “tinjau”, yaitu berarti pandangan atau pendapat sesudah mempelajari dan menyelidiki suatu masalah.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Peter Salim, Yenni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1999). h.61.

<sup>3</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997), h.55.

<sup>4</sup>Dapartemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, h. 951.

Menurut Syarifuddin, Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul, tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>5</sup>

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>6</sup>

Berdasarkan penegasan judul tersebut, maksud judul skripsi ini adalah memberikan pengertian terhadap masyarakat dan para pembaca bahwa pernikahan beda agama ditinjau dari perspektif hukum Islam tidak dibenarkan di dalam ajaran Islam. Akan tetapi HAM terdapat kebebasan beragama juga kebebasan untuk menikah dan meneruskan keturunan.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan yang mendorong penulis untuk memilih Pernikahan beda Agama ditinjau dari Hukum Islam dan HAM, adalah sebagai berikut :

### **1. Alasan Objektif**

Mengingat fenomena pernikahan beda agama sering terjadi di Indonesia dan merupakan penyimpangan yang bertentangan dengan agama, sehingga

---

<sup>5</sup> Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, h. 2.

<sup>6</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Jakarta Sinar Grafika, 2000, cet. Ke-2), h.3.

menarik untuk dikaji dilihat dari sudut pandang Hukum Islam dan HAM khususnya mengenai pernikahan beda agama.

## 2. Alasan Subjektif

Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Ahwal Al-Syakhsyah serta terjadinya literatur yang menunjang sebagai referensi kajian dan data dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah.

### C. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia membutuhkan pendamping dalam hidupnya, baik untuk menyempurnakan agamanya berbagi cinta, kasih, melanjutkan keturunan agar tidak jatuh pada kemaksiatan. Masyarakat Indonesia yang bermacam-macam suku, ras, agama, dan lainnya. Manusia diciptakan berpasang-pasangan, dalam kultur masyarakat Indonesia mencari pasangan ditempuh dengan jalur pernikahan. Karena keberagaman suku, ras, dan agama yang ada di Indonesia, pernikahan yang berbeda suku, bahkan pernikahan beda agama banyak terjadi di Indonesia.

Perbedaan dalam suatu pernikahan itu dianggap lumrah, namun bila yang berbeda adalah agama, hal itu menimbulkan permasalahan karena dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>7</sup> Dengan ketentuan pasal tersebut, bisa diartikan Pernikahan dapat dikatakan sah apabila pasangan yang hendak menikah adalah seagama atau satu kepercayaan.

---

<sup>7</sup> Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



Oleh karena itu ketentuan dalam Pasal tersebut, tidak jarang saat seseorang yang hendak melangkah ke jenjang perkawinan tapi ia memiliki calon pendamping yang belainan agama. Pasangan tersebut akan berpindah agama atau melakukan penyelundupan hukum, untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Seseorang bisa pindah agama mengikuti calon pendampingnya atau sebaliknya, agar pernikahan pasangan tersebut dikatakan sah. Dalam pandangan Hak Asasi Manusia, terus berlanjut seiring dengan perkembangannya, tidak terkecuali di Indonesia. Salah satu instrumen hukum HAM di Indonesia adalah lahirnya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berisi 11 bab 106 pasal. Maka dengan lahirnya undang-undang tersebut, HAM adalah hak-hak yang diakui secara konstitusional. Sehingga pelanggaran terhadap HAM merupakan pelanggaran atas konstitusi. Untuk mendukung terwujudnya kesadaran kolektif atas eksistensi HAM maka pemerintah menyadari bahwa kebijakannya harus mengedepankan isu-isu HAM. Meskipun pada dasarnya HAM bukanlah berada pada wilayah politik, namun dalam praktek bernegara, terlaksananya HAM secara baik dan bertanggung jawab sangat tergantung kepada *political will* dan *political action* dari penyelenggara negara.

Salah satu kebijakan negara Indonesia dalam persoalan klasik yang tetap menjadi isu aktual dalam wacana hukum Islam adalah wacana perkawinan beda agama. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”. Untuk memenuhi tuntutan bunyi pasal tersebut, maka bagi umat Islam di Indonesia melahirkan Kompilasi Hukum Islam

(selanjutnya disebut KHI) yang diantara materi-materinya adalah masalah kawin beda agama yaitu pasal 40 huruf (c) dan pasal 44. Hanya saja materi yang termuat dalam pasal tersebut adalah berupa pelarangan tegas terhadap persoalan kawin beda agama.

Larangan tersebut tentu saja perlu dikritisi lebih lanjut karena beberapa hal yaitu, *pertama* sebagai satu negara yang sudah memiliki instrumen hukum berupa Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, idealnya negara menjamin kebebasan warganya untuk memilih pasangannya dalam membentuk sebuah keluarga. Hak untuk memilih pasangan hidup merupakan kebebasan yang harus diakui keberadaannya oleh negara. Berdasarkan pasal 10 ayat (1) dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas. Kenyataannya, negara justru membatasi perkawinan tersebut. *Kedua*, Indonesia bukan negara teokrasi dan bukan pula negara sekuler sehingga di dalam pembentukan hukum nasional, pemerintah harus bisa menjamin kepastian hukum kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat agama dan kepercayaan yang dianut, termasuk dalam persoalan perkawinan beda agama. *Ketiga*, perkawinan antar agama secara objektif sosiologis adalah wajar karena penduduk Indonesia memeluk bermacam-macam agama dan UUD 1945 menjamin kemerdekaan beragama bagi setiap penduduknya sehingga tentu saja terbuka kemungkinan terjadinya dua orang berbeda agama saling jatuh cinta dan pada akhirnya membentuk sebuah keluarga. *Keempat*, akibat tidak diaturnya ketentuan mengenai perkawinan beda agama dalam Undang-Undang No 1 Tahun

1974, maka hal tersebut membuka ruang terjadinya penyeludupan hukum. Untuk memenuhi persyaratan formal secara perdata, suami-istri berbeda agama rela melangsungkan pernikahan di luar negeri tanpa memperhatikan hukum agama, atau salah satu pihak pura-pura pindah agama.

Perbincangan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sangat gencar dibicarakan. Hal ini berawal dari kuatnya paham liberalisme yang dibawa-bawa oleh bangsa Barat. Kendati nilai-nilai HAM bersifat universal, namun beberapa hal masih menjadi perdebatan terkait dengan implementasi HAM tersebut. Salah satunya ialah hak untuk melangsungkan pernikahan dengan kondisi pasangan yang memiliki agama yang berbeda. Secara sederhana, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkawinan/pernikahan diartikan berdasarkan kata dasarnya menjadi melangsungkan pembentukan keluarga dengan lawan jenis. Pengertian tersebut tidak menjadi masalah ketika tidak menyentuh landasan idealisme, ketika seseorang atas dasar kepercayaannya tidak menjadikan suatu perkawinan itu dibolehkan atas dasar agama.

Hal yang demikian membuat tolak pikir umum, yakni haramnya perkawinan beda agama. Namun, dalam konteks sosial, khususnya di Indonesia yang sebanyak 85% lebih penduduknya beragama Islam, menjadi dinamika sosial yang patut mendapat perhatian dalam kasus perkawinan beda agama. Indonesia memiliki keberagaman dari berbagai aspek, tidak terkecuali agama yang menyebabkan adanya kemungkinan keberlangsungan pernikahan beda agama.

Pada tahun 1980, sebanyak 24677 pasangan di Indonesia melakukan pernikahan beda agama. Selanjutnya pada tahun 1990, sebanyak 26688 pasangan di Indonesia melakukan hal yang demikian. Serta hasil terbaru yang ditemukan oleh penulis, pada tahun 2000, 2673 pasangan didata sebagai pihak yang melakukan pernikahan beda agama.<sup>8</sup>

Kendati data tersebut menunjukkan penurunan, namun dalam interval sepuluh tahun data selalu menunjukkan adanya pernikahan beda agama yang berlangsung. Sehingga penulis melakukan kesimpulan awal, bahwa di Indonesia yang merupakan negara penuh keragaman termasuk agama terdapat pernikahan beda agama, tak terkecuali diantara orang Islam sendiri dengan orang di luar Islam.

Dengan terjadinya dinamika sosial tersebut, disertai adanya pertanyaan masyarakat tentang kebolehan nya, para ulama yang tergabung dalam majelis ulama Indonesia kemudian berusaha memberikan dalil agama untuk memberikan kepastian hukum terhadap kasus ini. Dalam fatwanya, MUI menyatakan dengan berbagai landasan dalil bahwa perkawinan beda agama adalah haram sama sekali, yang padahal bertentangan dengan jumbuh ulama.<sup>9</sup>

Dari berbagai kondisi sosial yang ada, serta faktor yuridis dan filosofis, tentang keberadaan pernikahan beda agama yang ternyata setelah

---

<sup>8</sup> Dimuat dalam artikel berjudul *Fakta Empiris Nikah Beda Agama* di <http://blog.umsida.ac.id/retnoeno/2012/01/07/fakta-empiris-nikah-beda-agama/>, di akses pada tanggal 20-06-2018.

<sup>9</sup> Faeshol Jamaludin, *Analisis Fatwa MUI Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama*, dimuat dalam <http://idb4.wikispaces.com/file/view/bu4001.pdf>, di akses pada tanggal 20-06-2018.



ditinjau lebih mendalam memiliki banyak kekosongan pemikiran, baik dalam pertentangan antara konsepsi HAM dalam kasus ini, bahkan hingga perbedaan pendapat para ulama, melandasi penulis untuk melakukan kajian terhadap judul ini.

Hukum perkawinan beda agama menurut islam, secara literal ditemukan dua buah ayat yang membicarakannya, yaitu Surat Al-Baqarah (2): 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ  
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ  
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ  
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”<sup>10</sup>

Allah melarang laki-laki muslim menikahi perempuan musyrik. Musyrik artinya orang yang menyekutukan Allah, atau orang yang tidak mempercayai keesaan Allah. Adapun yang dimaksud dengan *al-musyrikah* dalam ayat ini adalah orang-orang kafir watsani (penyembah berhala).<sup>11</sup> al-Qur'an membedakan antara

<sup>10</sup> Rahmat hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia) h.23

<sup>11</sup> *Ibid.* h.19.

al-musyrikin dengan ahl al-kitab (Yahudi dan Nasrani). Apa yang disebutkan dengan al-musyrikina tidak termasuk di dalam nya Yahudi dan Nasrani.<sup>12</sup>

Larangan menikahi perempuan musyrik itu dibatasi dengan keberimanannya. Artinya, apabila ia telah beriman atau masuk Islam, maka laki-laki muslim boleh menikahnya, ayat ini juga mengajarkan bahwa menikahi perempuan yang sangat rendah status sosialnya, seperti budak, adalah lebih baik dari pada menikah dengan perempuan merdeka, cantik atau kaya tetapi dia seorang musyrik, seharusnya yang dijadikan standar oleh seorang laki-laki muslim dalam mencari pasangan hidup adalah keberimanan dan keshalehan, sebab hal itulah yang dapat menyenangkannya, baik zhahir maupun batin.

Larangan dalam ayat ini ditunjukkan kepada para wali: mereka tidak boleh menikahkan wanita-wanita yang berada dalam wilayah kewalian nya dengan laki-laki musyrik. Larangan ini tidak terbatas terhadap kafir watsani saja, tetapi juga kafir kitabi. Jadi, dalam hal ini wanita muslim berbeda dengan laki-laki muslim; wanita muslim dilarang menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam, baik kafir watsani ataupun kafir kitabi.<sup>13</sup> Sedangkan laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan kafir kitabi.<sup>14</sup> Mereka hanya dilarang menikah dengan perempuan kafir watsani. Hal ini disebabkan karena Islam mengajarkan bahwa suami adalah pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Islam tidak rela umatnya di kendalikan oleh orang kafir. Apabila seorang wanita mukmin

---

<sup>12</sup> Kementrian Agama RI. *Op.Cit.*, h.43.

<sup>13</sup> Ibn Jarir at-Thabari. *Jami' al-bayan ff Ta'wil al-Qur'an* Vol.364.

<sup>14</sup> *Ibid.* h.12.

bersuami kan laki-laki yang tidak beragama Islam, maka jelas keluarganya itu akan dibawanya ke jalan yang tidak di ridhoi Allah.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan pokok-pokok pikiran di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pernikahan beda agama di Indonesia ?
2. Bagaimana pandangan HAM terhadap pernikahan beda agama ?
3. Persamaan dan Perbedaan Pernikahan Beda Agama dalam Hukum Islam dan HAM?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Ingin mengetahui secara mendalam tentang hukum pernikahan beda agama menurut Hukum Islam.
2. Ingin mengetahui HAM memandang larangan pernikahan beda agama.
3. Ingin mengetahui persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan HAM terhadap nikah beda agama.

Kegunaan Penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala berpikir bagi penulis dan pembaca, serta dapat menjadi salah satu bahan referensi.

2. Secara praktis, sebagai bentuk sumbangan pemikiran, bagi peneliti sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat digunakan oleh peneliti ketika sudah hidup berkeluarga pada khusus nya dan bermasyarakat pada umum nya, bagi masyarakat bermanfaat sebagai input (masukan) dalam menyelesaikan masalah bagi keluarga yang mempunyai permasalahan serupa dengan penelitian ini, bagi lembaga sebagai masukan yang konstruktif dan merupakan dokumen yang bisa dijadikan sumber pustaka.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a) Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>15</sup> Berkenaan dengan penelitian ini, penulis membaca dan mengambil teori-teori dari buku, jurnal, ataupun literatur lain yang berkaitan dengan masalah Pernikahan Beda Agama tersebut, menetapkan hukum yang menyimpulkan hasil penelitian dari berbagai macam sumber tersebut.

---

<sup>15</sup> Ranny Kautur, Metode Penulisan untuk Penulisan Skripsi dan Tesis (Bandung: Taruna Grafika, 2000), h.38



b) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif yuridis yaitu penelitian hukum yang di dasarkan pada bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan,dengan mencoba untuk menganalisa suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan lainnya yang relevan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.<sup>16</sup> Bahan hukum primer berupa al-Qur'an, Hadits, UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.
- b) Bahan Hukum Sekunder, Merupakan sumber yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu, Buku-buku, Makalah, Jurnal, Akses artikel internet yang berkaitan dengan masalah pernikahan beda agama baik dalam hukum Islam dan HAM.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan menggunakan metode dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, artikel-artikel dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan dalam

---

<sup>16</sup> Muhammad Abdul kadir, *Hukum dan penelitian hukum* (Bandung:PT.Citra Aditia Bakti, 2004),Hal 133.

penulisan skripsi ini. Situs web juga menjadi bahan bagi penulisan skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.

#### 4. Metode pengelolaan data

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data sebagai berikut:

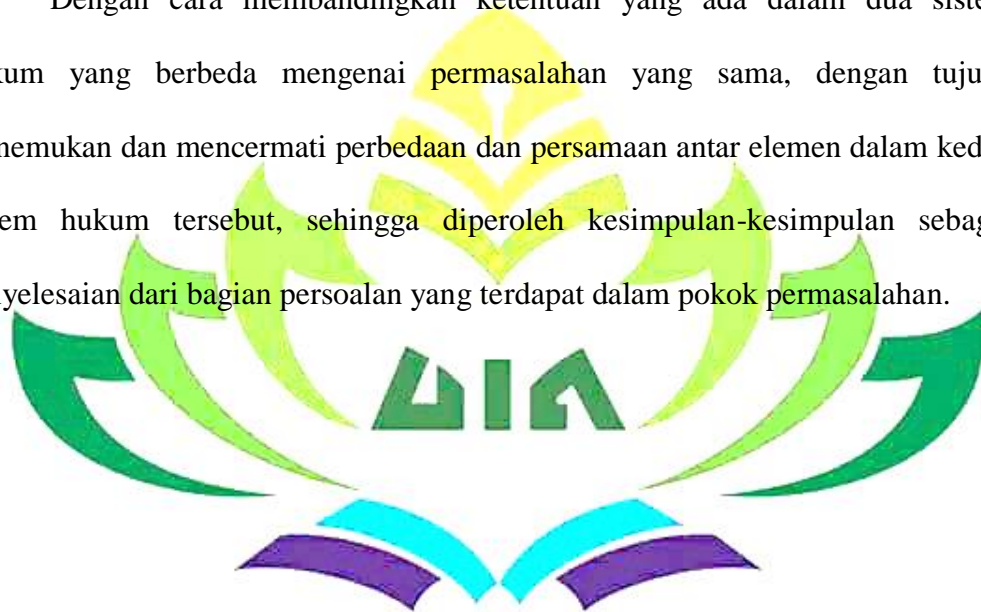
- a) Pemeriksaan Data (*Editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai dengan masalah yang penulis teliti seperti buku-buku tentang Hukum Pernikahan beda agama.
- b) Rekonstruksi Data (*Reconstructing*), yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah dipahami.
- c) Sistematisasi Data (*Systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

Setelah terkumpul data, penulis mengoreksi data dengan cara mengecek kelengkapan data yang sesuai dengan permasalahan, setelah itu memberikan catatan atau tanda khusus berdasarkan sumber data dan rumusan masalah, kemudian disusun ulang secara teratur berurutan sehingga dapat menjadi sebuah permasalahan yang dapat dipahami, dengan menetapkan data secara sistematis sesuai dengan urutan permasalahan, sehingga dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian.

## 5. Metode Analisis Data

Setelah data terhimpun melalui penelitian yang telah dilakukan, maka selanjutnya data dapat dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif, deduktif dan komparatif. Metode berfikir induktif adalah keputusan baru yang bersifat umum yang didapat dari keputusan-keputusan yang bersifat khusus.<sup>17</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan metode berfikir deduktif adalah suatu penganalisa yang perangkat dari pengetahuan yang umum, kita hendak menilai suatu kejadian dengan secara khusus.<sup>18</sup>

Dengan cara membandingkan ketentuan yang ada dalam dua sistem hukum yang berbeda mengenai permasalahan yang sama, dengan tujuan menemukan dan mencermati perbedaan dan persamaan antar elemen dalam kedua sistem hukum tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai penyelesaian dari bagian persoalan yang terdapat dalam pokok permasalahan.



---

<sup>17</sup> Komarudin, *metode penulisan skripsi dan thesis* (Bandung: angkasa, 2002), h. 150.

<sup>18</sup> Sutrisno adi, *Metodelogi Riset* (Yogyakarta: Gajah Mada University press, 2001), h. 50.

## **BAB II**

### **PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM HUKUM ISLAM DAN HAM**

#### **A. Pernikahan Beda Agama dalam Hukum Islam**

Pembahasan pernikahan beda agama ini akan dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Pernikahan dengan Non Muslim/ kafir
- b. Pernikahan dengan ahli kitab.

Dalam pembedaan dua kategori antara non muslim/kafir dengan ahli kitab ini memang terdapat sebuah pembedaan yang menimbulkan konsekuensi dalam hukumnya, non muslim/kafir adalah orang-orang yang mengingkari Tuhan,<sup>19</sup> sementara pengertian ahli kitab adalah orang yang menganut salah satu agama Samawi yang mempunyai kitab suci seperti Taurat, Injil, dan Zabur.<sup>20</sup>

#### **a. Pernikahan dengan non muslim/kafir**

Merupakan definisi yang sangat luas, para ulama' berpendapat bahwa istilah non muslim atau kafir disimpulkan oleh pakar al-Qur'an, Syeikh Muhammad Abduh segala aktifitas yang bertentangan dengan ajaran tujuan agama.<sup>21</sup> Tentu saja maksudnya tidak mengarah pada suatu kelompok agama saja, akan tetapi mencakup sejumlah agama dengan segala bentuk kepercayaan dan variasi ritualnya. al-Qur'an menyebutkan muslim ini secara umum seperti dalam Q.S al-Hajj ayat 17:

---

<sup>19</sup> Zuhdi Muhdhor dan Atabik, Ali, h.1512.

<sup>20</sup> Masri Elmahsyar Bidin, *Prinsip Hubungan Muslim dan Non Muslim dalam Pandangan Islam*, diakses pada tanggal 30 April 2018.

<sup>21</sup> M.Quraish Shihab, *M.Quraish Shihab menjawab – 1001 soal KeIslaman yang Patut Anda Ketahui*, ( Jakarta : Lentera Hati, 2008) h. 772.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ  
أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٤٧﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabi-iin orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”

Dalam ayat Al-Qur'an tadi terdapat lima kelompok yang dikategorikan sebagai non muslim, yaitu Yahudi, Nasrani, ash-Shabi'ah atau ash-Shabiin, al-Majus, al-Musyrikun. Masing-masing kelompok secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, Yahudi adalah kaum bangsa Israel yang mengamalkan ajaran Nabi Musa/Taurat. Kedua, Nasrani/Nashiroh yang diambil dari nama *Nashiroh* (tempat lahir Nabi Isa), mereka adalah kelompok yang mengajarkan ajaran nabi Isa. Ketiga, *Ash-Shabi'ah*, yaitu kelompok yang mempercayai pengaruh planet terhadap alam semesta. Keempat, *Al-Majus* yaitu para penyembah api yang mempercayai bahwa jagat raya dikontrol oleh dua sosok Tuhan, yaitu Tuhan Cahaya dan Tuhan Gelap yang masing-masingnya bergerak kepada yang baik dan yang jahat, yang bahagia dan yang celaka dan seterusnya.<sup>22</sup> Dan *Al-Musyrikun*, kelompok yang mengakui ketuhanan Allah swt, tapi dalam ritual mempersekutukannya dengan yang lain seperti penyembahan berhala, matahari dan malaikat.

---

<sup>22</sup> Quraish shihab, Tafsir Al-Misbah (Volume 9) (Jakarta :Lentera Hati, 2002), hlm.29



Dari pengertian Non muslim/kafir diatas, maka dapat disimpulkan bahwa lawan dari kata kafir adalah mukmin, orang yang mengimani Allah, dalam surat Al-Mumtahanah menjelaskan bahwa adanya pelarangan untuk tetap meneruskan hubungan pernikahan dengan wanita kafir, sampai mereka beriman kepada Allah. Larangan pernikahan beda agama dengan non muslim/kafir secara global telah disepakati para ulama.<sup>23</sup> Lebih lanjut, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa larangan pernikahan dengan non muslim atau kafir juga didasarkan pada surat al-Baqoroh: 221 beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan musyrik dalam ayat tersebut adalah penyembah berhala.

Larangan pernikahan beda agama ini kemudian dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. KHI yang diberlakukan dengan intruksi presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 1991, melarang seorang muslim melakukan perkawinan beda agama. Larangan ini diatur dalam pasal 40 huruf c KHI.<sup>24</sup> Sementara larangan pernikahan beda agama bagi wanita diatur dalam pasal 44 KHI.<sup>25</sup> Secara normatif larangan menikah beda agama ini tidak menjadi masalah, karena hal tersebut sejalan dengan ketentuan al-Qur'an yang disepakati oleh para *fuqaha*.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Imam al-Qodhi, h. 36.

<sup>24</sup> Dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu: a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

<sup>25</sup> Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

<sup>26</sup> Karyasuda, *Op.Cit*, h.7.

## **b. Pernikahan dengan ahli kitab**

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *ahlul kitab* adalah seorang Yahudi dan seorang Nasrani keturunan orang-orang Israel, tidak termasuk bangsa-bangsa lain yang menganut agama yahudi dan nasrani. Alasan yang dikemukakan oleh imam Syafi'i adalah bahwa nabi Musa dan nabi Isa hanya diutus kepada bangsa mereka, bukan bangsa lain. Pendapat ini berbeda dengan Imam Hambali dan mayoritas pakar hukum Islam yang menyatakan bahwa siapa pun yang mempercayai salah seorang Nabi atau kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, maka dia adalah ahlul kitab. Sementara sebagian Ulama' berpendapat bahwa ahli kitab adalah setiap umat yang memiliki kitab dan dapat diduga sebagai kitab suci.<sup>27</sup>

Pendapat terakhir ini kemudian diperluas lagi oleh para ulama 'kontemporer, sehingga mencakup para agama-agama yang ada di Indonesia seperti Hindu dan Budha. Sementara menurut ulama 'Muhammad Rasyid Ridho dalam *tafsir al manaar*, setelah beliau memahami dan mempelajari segala yang berkaitan dengan pernikahan beda agama, beliau menyimpulkan bahwa wanita musyrik yang tidak diperbolehkan dinikahi yang disebutkan dalam al-Qur'an: 221 adalah wanita musyrik arab.

Pendapat mengenai kebolehan menikahi wanita ahli kitab juga didukung oleh pendapat *jumhur ulama'* yang mengatakan bahwa QS Al-Maidah: 5 merupakan bentuk pengkhususan dari Al-Baqoroh: 221, sehingga pernikahan dengan ahli kitab menjadi diperbolehkan.<sup>28</sup> Pendapat ini juga mendapat dukungan

---

<sup>27</sup> M.Quraish Shihab, M. Quraish..., *Op.Cit*, h. 595.

<sup>28</sup> Imam al-Qodhi, *Op.Cit*, h. 36.

dari Syaf'iyah yang menolak bahwa QS Al-Maidah: 5 yang bersifat khusus dihapus oleh surat Al-Baqoroh;221, akan tetapi mereka mensyaratkan bahwa ahli kitab tersebut harus memenuhi kriteria tertentu.<sup>29</sup>

Pendapat mengenai larangan menikahi ahli kitab dirumuskan oleh sebagian ulama' yang menyatakan bahwa QS Al-Maidah: 5 merupakan bentuk khusus dari bentuk umum tersebut menghapus bentuk khusus. Senada dengan pendapat tersebut, sahabat nabi, Ibnu Umar, menyatakan bahwa pada zaman beliau, ajaran trinitas tidak lagi wajar dinamai dengan *ahlul kitab*, karena keyakinan tersebut merupakan bentuk penyekutuan terhadap Allah.

Dari pendapat dua diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya para ulama' Islam berbeda pendapat dalam memandang hukum pernikahan beda agama terkait dengan seorang laki-laki muslim yang menikahi wanita non muslim yang ahli kitab. Perbedaan ini pada dasarnya berimplikasi terhadap hukum pernikahan beda agama tersebut, yaitu halal dan haram.

Pernikahan beda agama yang dibahas di skripsi ini, harus dipahami sebagai fenomena sosial yang terjadi setelah turunnya al-Qur'an hingga masa kini. pernikahan beda agama dalam hukum Islam, akan dijabarkan beberapa hal yang mendukung, yaitu :

## **1. Pengertian Pernikahan**

Pengertian pernikahan Secara etimologi bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan

---

<sup>29</sup> Karsayuda, *Op.Cit*, h. 79.

lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>30</sup> Perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.

Menurut istilah Hukum Islam, terdapat beberapa definisi perkawinan, diantaranya adalah:

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مِلْكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلٍّ َ السِّمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ.<sup>31</sup>

Artinya : *“Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki”*

Nikah adalah suatu akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafazh *“an-nikâh”* atau *“at tazwîj”*, artinya bersetubuh, dengan pengertian menikahi perempuan maka hakikatnya menggauli istri dan kata *“munakahat”* diartikan saling menggauli. Pergaulan yang dimaksud bukan hanya berlaku bagi manusia tetapi berlaku pula untuk semua makhluk Allah, binatang pun melakukan pernikahan.

Pada kitab-kitab fiqh, pembahasan pernikahan dimasukkan dalam suatu bab yang disebut dengan *munakahat*, yaitu suatu bagian dari ilmu fiqh yang khusus membahas perkawinan untuk membedakannya dari bab-bab lain dengan masalah yang berbeda. Kata *‘munakahat’* mengandung interaksi dua pelaku atau lebih,

---

<sup>30</sup> Kemendikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), cet. ke-3, edisi ke-2, h. 456.

<sup>31</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*. (Bandung: Pustaka setia, 2000), h. 12.

sebab perkawinan memang interaksi tidak pernah terjadi dengan pelaku tunggal, selamanya melibatkan pasangan, dua jenis pelaku yang berlainan jenis kelamin.<sup>32</sup>

Para fuqaha dan madzhab empat sepakat bahwa makna nikah adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin.<sup>33</sup>

Nikah dalam istilah fiqih, yang dikemukakan oleh para fuqaha adalah diantaranya :

- a) Zakaria al-Ansari mengemukakan bahwa nikah adalah suatu akad yang mengandung jaminan diperbolehkannya persetubuhan dengan lafadz nikah dan sejenisnya.
- b) Muhammad Ibnu Qasim al-Ghazaly, nikah adalah suatu hal yang mencakup atas rukun-rukun dan syarat-syarat nikah.
- c) Ahmad bi Ali-Anshari, nikah adalah suatu rumusan dari akad-akad syara' yang disunatkan berdasarkan atas pokok-pokok syara'.
- d) Menurut Syaikh Zainudin, nikah merupakan suatu rumusan dari akad yang masyhur mencakup atas rukun-rukun dan syarat-syarat.
- e) Menurut Syaikh Zainudin Ibnu Abd. Al-aziz nikah menurut syara' adalah akad yang mengandung jaminan diperbolehkan bersetubuh dengan lafadz *nikâh* atau *at tazwîj* ".<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.* h. 11.

<sup>33</sup> Beni Ahmad saebani. *Fiqh Munakahat*, (Bandung; CV Pustaka setia. 2013), h.9.

<sup>34</sup> Wagianto "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Mut'ah dan sirri dalam Perspektif Politik Hukum", (Semarang : Disertai Program Doktor Ilmu Hukum. Universitas Diponegoro, 2010), h.99.



Sehubungan dengan keterkaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiah Daradjat :

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلََّ الْعَشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنُهُمَا وَيُحَدُّ مَالِكَيْهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَجِبَاتٍ.

Artinya : “Akad yang memberikan faedah hukum yang membolehkan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemahaman kewajiban bagi masing-masing”.<sup>35</sup>

Terminologi yang berlaku untuk digunakan kata “perkawinan” meskipun istilah tersebut tidak mutlak, karena dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam, tidak digunakan kata “nikah atau pernikahan” melainkan digunakan kata “perkawinan”. Hal itu artinya bahwa makna nikah atau kawin berlaku untuk semua yang merupakan aktivitas persetubuhan. Karena kata “nikah” adalah Bahasa Arab, sedangkan kata “kawin” adalah kata yang berasal dari Bahasa Indonesia.<sup>36</sup>

Abdurahman Al-Jaziri mengatakan bahwa, perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian, ia mengandung adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Dengan demikian, jauh sekali dari segala yang dapat diartikan mengandung suatu paksaan. Karena itu, baik pihak

---

<sup>35</sup> Abdul Rahman Ghazali, “*Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana Perdana Media Group.2012,h.9.

<sup>36</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung; CV Pustaka setia. 2013),. h. 11.

laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak melangsungkan perkawinan.<sup>37</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, lebih lanjut mengomentari : Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan.

Pengertian dari perkawinan ini mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah swt.<sup>38</sup>

Pada literatur, yang sesungguhnya semata-mata merupakan kata turunan dari istilah yang digunakan al-Qur'an dan Hadits, perkawinan lazim diistilahkan dengan sebutan *an-nikâh* atau *at tazwîj*.<sup>39</sup> Kata nikah dalam al-Qur'an terkadang

---

<sup>37</sup> Abdul Rahman, *Op. Cit*, h.14.

<sup>38</sup> *Ibid.* h. 10.

<sup>39</sup> Abd Syakur, Tim hukumonline.com, *Tanya jawab tentang nikah beda agama menurut hukum islam di indonesia* (Tangerang: Lentera hati,2014), cct.1, h.186.

digunakan untuk menyebut akad nikah. Contoh menikah yang artinya akad nikah adalah :

Firman Allah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ  
وَرُبُعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.<sup>40</sup>

Sedangkan ayat yang menyebut untuk suatu hubungan seksual.<sup>41</sup> Adalah firman Allah :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ  
يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya : “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.(Q.S Al Baqarah : 230).<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ( Bandung CV. Diponegoro. 2012), h. 99.

<sup>41</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (IAIN Raden Intan Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M, 2015), h.35-38.

<sup>42</sup> Kementrian Agama RI, *Op.Cit.*, h.46.

Perjanjian dinyatakan dalam bentuk ijab dan kabul yang harus diucapkan dalam suatu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yaitu calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada dibawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.<sup>43</sup>

Pernikahan dapat dilihat dari 3 (tiga ) segi pandangan, yaitu :

a. Hukum

Dipandang dari segi hukum perkawinan itu merupakan suatu perjanjian yang terdapat pada Q.S An-Nisa ayat 21, dinyatakan “perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat”, disebut dengan kata-kata “*mîtsâgha ghalîzhan*”

b. Sosial

Segi sosial dari suatu perkawinan, dalam masyarakat setiap bangsa ditemui suatu penilaian yang umum ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

c. Agama

Pandangan suatu perkawinan dari segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan

---

<sup>43</sup> Abdul Rahman Ghazali, “*Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana Perdana Media Group.2012.

menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.<sup>44</sup>

Substansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta sunah Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai suatu perikatan yang kokoh (*mîtsâqon ghâlidzhan*), perkawinan dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis semata.<sup>45</sup>

Pengertian yang dikemukakan selaras dengan pengertian yang diinginkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>46</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI), menjelaskan perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut : Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2).

---

<sup>44</sup> Idris Ramulyo *Hukum Perkawinan Islam* (jakarta: PT Bumi Aksara, h.17-19.

<sup>45</sup> Beni Ahmad Saebani. *Op.Cit.*, h.15.

<sup>46</sup> *Ibid.*



Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3).<sup>47</sup>

Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan ucapan ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapakan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.<sup>48</sup>

## **2. Dasar Hukum Melakukan Perkawinan**

Dasar hukum dilaksanakan suatu perkawinan akan dipaparkan melalui al-Qur'an dan Hadits yaitu :

### **a. Sumber Hukum Perkawinan dalam al-Qur'an**

Adapun dasar disyariatkannya perkawinan terdapat firman Allah swt dalam al-Qur'an diantaranya :

---

<sup>47</sup> H.Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995). h. 114.

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*, ( Beirut: Dar al-Fikr, 1983). h.5.

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”<sup>49</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>50</sup>

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً  
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعِمَّتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٢٣﴾

Artinya : “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”<sup>51</sup>

Pada ayat-ayat yang dikemukakan di atas, Allah swt menjadikan istri-istri untuk manusia (termasuk rasul-Nya) dengan tujuan agar mendapatkan cinta dan kasih sayang serta keturunan sebagai generasi penerus. Dalam hal ini, apa yang

<sup>49</sup> Q.S An-Nur (24): 32, Kementrian Agama RI., Op. Cit. h.495.

<sup>50</sup> Q.S Ar-Rum (30): 21, Ibid, h.407.

<sup>51</sup> Q.S An-Nahl (16): 72 Ibid, h.374.

diperoleh dalam perkawinan tersebut harus sesuai dengan jalan yang telah ditetapkan Allah swt.<sup>52</sup>

#### b. Sumber Hukum Perkawinan dalam hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ <sup>٥٣</sup>

Artinya : Dari Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallahu 'anhu berkata : Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami : :Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.<sup>54</sup>

Dalam hadits tersebut Nabi mengajarkan bahwa perkawinan tidaklah semata-mata dimaksud untuk menunaikan hasrat *biologis*. Kalau hanya itu, tujuan perkawinan hanya memiliki nilai yang sama dengan perkawinan yang dianut *biologi*, yaitu mempertemukan jantan dan betina hanya untuk memenuhi kebutuhan reproduksi generasi.<sup>55</sup>

### 3. Anjuran untuk Memilih Pasangan

Anjuran memilih pasangan, alangkah lebih baik dari segi agama terlebih dahulu. Allah swt berfirman dalam yaitu :

---

<sup>52</sup> Dedi Junaedi, *Op.Cit.*,h. 10-11.

<sup>53</sup> Alhafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Marom*, (Surabaya; Nurul Huda, t.t). h.208

<sup>54</sup> Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Marom*, (Semarang; Dahara Prize, 2014), h.224.

<sup>55</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.15.

..إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۖ

Artinya : “...Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu...”<sup>56</sup>

..فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ

Artinya : “...Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)...”<sup>57</sup>

Pendapat Abdullah bin ‘Amr secara *marfu*, ia mengatakan : “Jangan menikahi wanita karena kecantikannya, dan jangan menikahi wanita karena hartanya, bisa jadi hartanya membuatnya melampaui batas. Tetapi nikahilah wanita atas perkara agamanya. Sungguh hamba sahaya wanita sebagian hidungnya terpotong lagi berkulit hitam tapi taat beragama adalah lebih baik”.<sup>58</sup>

Syaikh al- Azhim Abad berkata : Makna “*fazhfaz bidzâtîd dîn* (ambilah yang mempunyai agama)’ bahwa yang pantas bagi orang yang mempunyai agama dan adab yang baik ialah agar agama menjadi pertimbangannya dalam segala sesuatu, terutama berkenaan dengan pendamping hidup. Oleh karenanya Nabi saw memerintahkan supaya mencari wanita yang beragama yang merupakan puncak pencarian. *Taribat Yadâka*, yakni menempel dengan tanah.”<sup>59</sup>

<sup>56</sup> Kementrian Agama RI., *Op. Cit.* h.745 Q.S Al-Hujurat ayat 13.

<sup>57</sup> *Ibid.*, h.108-109 Q.S. An-Nisaa ayat 34.

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

#### 4. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Pemahaman rukun dan syarat sah perkawinan, harus terlebih dahulu dipahami tentang pengertian rukun dan syarat. “Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misal akad perkawinan), baik dari segi para subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung.<sup>60</sup>” Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat “Sah, yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun serta syarat”.<sup>61</sup>

Rukun menurut kalangan ulama Hanifah adalah sesuatu yang sangat bergantung atasnya keberadaan sesuatu yang lain dan ia (sesuatu itu) secara substantif merupakan bagian integral dalam hakikatnya; sedangkan syarat menurut mereka (ulama Hanafiah) adalah sesuatu yang atasnya bergantung keberadaan sesuatu yang lain, namun sesuatunya itu sendiri bukanlah merupakan bagian integral dari hakikat sesuatu itu.<sup>62</sup>

Sedangkan menurut *jumhur ulama*, rukun adalah sesuatu yang menentukan atau esensi suatu perbuatan, baik rukun itu merupakan bagian dari perbuatan itu atau tidak. Misalnya orang yang berakad, menurut *jumhur ulama* adalah rukun

---

<sup>60</sup> Neng Djubaedah *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.90.

<sup>61</sup> Tihami dan Sohrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, ( Jakarta : PT RajaGrafindo, 2009), h.11.

<sup>62</sup> Abd.Syukur Dj. Dan Tim hukumonline.com, *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia*, (Tangerang; Literati, 2014), h.204-205.



karena menentukan terbentuknya akad, oleh karena itu orang yang berakad adalah bukan syarat.<sup>63</sup>

Persyaratan dan rukun, memang tidak seorangpun fuqoha konvensional yang secara tegas memberikan definisi rukun dan syarat perkawinan. Namun diakuinya bahwa memang ada beberapa fuqoha yang menyebutkan unsur mana yang menjadi rukun dan syarat perkawinan.

Tentang jumlah rukun nikah ini Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima :

- 1) Wali dari pihak perempuan
- 2) Mahar (maskawin)
- 3) Calon Pengantin Laki-Laki
- 4) Calon Pengantin Perempuan
- 5) *Sighat* akad nikah.<sup>64</sup>

Menurut Imam syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu;

- 1) Calon pengantin laki-laki
- 2) Calon pengantin perempuan
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) *Sighat* akad nikah

---

<sup>63</sup> Neng Djubaedah *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.92.

<sup>64</sup> Khoirul Abror, *Op. Cit.*, h.52-53.

Menurut ulama' Hanafiah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).

Menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di sebutkan rukun perkawinan :

- a. Calon Suami
- b. Calon Istri
- c. Wali Nikah
- d. Dua Orang Saksi
- e. Ijab Kabul.<sup>65</sup>

Menurut ketentuan yang ada didalam Kompilasi Hukum Islam, bab 5 pasal 30-38 bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak mempelai pria yang menjadi hak pribadi calon mempelai wanita, dan wajib diberikan kepada calon mempelai wanita.<sup>66</sup>

Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan poin 1 kewajiban menyerahkan bukan merupakan rukun dalam perkawinan.<sup>67</sup>

Wagianto menjelaskan, syarat yaitu suatu yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan yang menjadikan sahnya perkawinan apabila telah terpenuhinya syarat rukun sebagai berikut<sup>68</sup> :

- a. Calon suami, syaratnya :

---

<sup>65</sup> H.Abdurrahman. *Op.Cit.*, h.65.

<sup>66</sup> Seri Pustaka, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: 2004), h.21.

<sup>67</sup> *Ibid*, Pasal 34.

<sup>68</sup> Wagianto, *Op.Cit.*, h.122-124.

- 1) Beragama Islam
- 2) Jelas bahwa laki-laki
- 3) Atas keinginan dan pilihan sendiri (tidak karena paksaan)
- 4) Tidak ber istri
- 5) Tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon istri
- 6) Tidak sedang berihram haji atau umrah

b. Calon istri, syaratnya :

- 1) Beragama Islam
- 2) Jelas bahwa ia seorang perempuan
- 3) Mendapat izin dari walinya
- 4) Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah
- 5) Tidak mempunyai hubungan mahrom dengan calon suami
- 6) Belum pernah dili'an (dituduh berbuat zina) oleh calon suaminya
- 7) Jika ia janda, harus atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan oleh siapapun.
- 8) Jelas ada orangnya
- 9) Tidak sedang berihram/umrah

c. Syarat-syarat sighat

- 1) Dengan lafadz tazwij atau nikah
- 2) Dengan lafadz yang jelas (sharih) dalam ijab kabul
- 3) Kesiambungan ijab dan kabul
- 4) Tidak dibatasi waktu pihak yang berakad termasuk pihak yang terlibat dalam akad nikah hingga selesai Kabul.

d. Syarat-syarat wali

- 1) Islam adil
- 2) Baligh dan berakal
- 3) Tidak dalam pengampuan
- 4) Tidak mempunyai penyakit yang merusak pikiran.

e. Syarat-syarat saksi

- 1) Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Adil
- 4) Dapat mendengar dan melihat.

Syarat-syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain :

- a. Adanya persetujuan antara calon suami dengan calon isteri (tidak ada unsur paksaan).
- b. Calon suami telah berumur 19 tahun dan calon istri berumur 16 tahun atau mendapatkan dispensasi dari pengadilan apabila belum mencapai umur yang ditentukan tersebut.
- c. Harus mendapatkan izin dari kedua orangtua masing-masing mempelai.
- d. Tidak ada halangan perkawinan antara calon suami dengan calon isteri.
- e. Tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain.
- f. Perempuan yang terputus perkawinannya tidak sedang dalam masa tunggu.

g. Perkawinan dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan.<sup>69</sup>

## 5. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbul kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Menurut Imam Al-Ghazali tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta kasih sayang.<sup>70</sup>

Menurut Khoirul Abror, dalam bukunya Hukum Perkawinan dan Perceraian tujuan perkawinan yang relevan dan disadarkan kepada Al-Qur'an yaitu<sup>71</sup> :

---

<sup>69</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), Cct. V. Hlm.58-59

<sup>70</sup> Abdul Rahman Ghazali *Fiqh Munakahat* (Jakarta:

<sup>71</sup> Wagianto, *Op.Cit.*, h.122-124.



1. Bertujuan untuk membangun keluarga sakinah yang berbunyi :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>72</sup>

2. Bertujuan untuk regenerasi dan/atau pengembangbiakan manusia (reproduksi) atau mendapatkan keturunan dan secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi agama Islam<sup>73</sup>, sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa’ (4): 1 yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”

3. Bertujuan ibadah, hal ini dapat dipahami dalam Q.S. az-Zariyat (51) ayat 56 yaitu :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”<sup>74</sup>

<sup>72</sup> Q.S. ar-Rum (30) 2, Kementrian Agama RI, *Op.Cit.*, h.572.

<sup>73</sup> Khoirul Abror, *Op.Cit.*, h.60.

<sup>74</sup> Kementrian Agama RI, *Op.Cit.*,h.756.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw, yang berbicara tentang tujuan perkawinan yang bertujuan untuk menata subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu diantara lembaga pendidikan formal, ibu-bapak lah yang dikenal pertama kali oleh putra-putri nya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakan, dapat menjadi dasar pertumbuhan/kepribadian sang putra-putri itu sendiri.<sup>75</sup>

Tujuan pernikahan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu adapula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.<sup>76</sup>

## **6. Larangan-Larangan Pernikahan**

### **a) Larangan Nikah Karena Pertalian Nasab**

Proses lahirnya sebuah keluarga atau rumah tangga dimulai dari hasrat dan keinginan individu untuk menyatu dengan individu lainnya. Hasrat itu merupakan fitrah yang dibawa sejak individu itu lahir. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hasrat manusia sejak dilahirkan adalah: *pertama*, menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya; *kedua*, menjadi satu dengan suasana alam

---

<sup>75</sup> Wagianto, *Op.Cit.*, h.117.

<sup>76</sup> Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Bumi Aksara 2004). h.26-27.

sekelilingnya. Oleh karena itu terbentuknya sebuah keluarga diawali dengan proses memilih yang dilakukan oleh individu yang berlainan jenis kelamin, lalu melamar (*khitbah*), dan dilangsungkan dengan perkawinan (*al-nikah*).<sup>77</sup> Dalam memilih calon pasangan hidup berkeluarga, Nabi Muhammad saw. Telah menentukan beberapa kriteria seseorang untuk dapat dinikahi, di antaranya: tidak ada pertalian darah, sudah dewasa (*baligh*) dan berakal, berkemampuan, baik material maupun immaterial.

Dalam kaitan dengan masalah larangan nikah (*kawin*), disebut didasarkan pada firman Allah swt :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ﴿٢٣﴾

Artinya : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan...”

Berdasarkan ayat di atas, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (halangan abadi) karena pertalian nasab:

- 1) Ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya keatas).
- 2) Anak perempuan, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah.

---

<sup>77</sup> H. Abd, Rahman Ghazali, Op.Cit., hlm.104.

- 3) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.
- 4) Bibi: saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas.
- 5) Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan anak perempuan saudara laki-laki atau saudara laki-laki saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.<sup>78</sup>

**b) Larangan Kawin (Wanita yang Haram Dinikah) Karena Hubungan Susunan**

Larangan kawin karena hubungan sesusuan berdasarkan pada lanjutan surat Al-Nisa' ayat 23:

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ...

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu yang menyusukan kamu, dan saudara-saudara perempuan sepersusuan...”<sup>79</sup>

Jika diperinci hubungan sesusuan yang diharamkan adalah:

- 1) Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga haram melakukan perkawinan.
- 2) Nenek suami, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak susuan sehingga haram melakukan perkawinan.
- 3) Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya ke atas.

<sup>78</sup> Drs.Sohari Sahrani *Fiqih Munakahat*

<sup>79</sup> Hasbi Ash-Shiddieqi, *Al-Qur'an, Op.Cit.*,h.120.

- 4) Nenek susuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu susuan.
- 5) Saudara sesusuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja.<sup>80</sup>

**c) Wanita yang Haram Dinikahi Karena Hubungan Mushaharah (Pertalian Kerabat Semenda)**

Keharaman ini disebabkan dalam lanjutan surat An-Nisa ayat 23 sebagai berikut:

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ  
وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا  
دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ...

Artinya : “Diharamkan ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu( QS An-Nisa [4]:23)...<sup>81</sup>”

Pendapat disebabkan oleh perbedaan dalam menafsirkan firman Allah yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ...

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu...(QS An-Nisa [4]: 22)

<sup>80</sup> Zakiyah Darajat dkk, *Op.Cit.*, hlm.86-87.

<sup>81</sup> Hasbi Ash-Shiddieqi, *Al-Qur'an & terjemahannya*, *Op.Cit.*, hlm.120.



Kata “*ma nakaha*” ada yang menafsirkan “wanita yang dinikahi ayah secara akad yang sah” (Syafi’i). Sedangkan Imam Hanafi menafsirkan wanita yang disetubuhi oleh ayah, baik dengan perkawinan atau perzinaan.

Istri ayah (ibu tiri) haram dinikahi dengan sepakat para ulama atas dasar semata-mata akad walaupun tidak disetubuhi. Kalau sudah terjadi akad nikah, baik sudah disetubuhi atau belum namanya adalah istri ayah (*zaujatul ab*).

Ibu istri (mertua) digolongkan di dalamnya nenek dari istri dan ibu dari ayah istri hingga ke atas, karena mereka digolongkan dalam *ummahatu nisa’i* (ibu-ibu istri).

Anak istri (anak tiri) dengan syarat keharamnya karena telah menyetubuhi ibunya; artinya, kalau seorang pria dan seorang wanita baru terikat dengan hanya semata akad (belum terjadi persetubuhan) maka mengawini anaknya tidak haram (boleh).

#### **d) Wanita yang Haram Dinikahi Karena Sumpah Li’an**

Seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang saksi, maka suami diharuskan bersumpah empat kali dan yang kelima kali dilanjutkan dengan menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila tindakannya itu dusta. Istri yang mendapat tuduhan itu bebas dari hukuman zina kalau mau bersumpah seperti di atas empat kali dan kelima kalinya diteruskan bersedia mendapat laknat bila tuduhan suami itu benar. Apabila terjadi sumpah li’an antara suami istri maka putuslah hubungan perkawinan keduanya

untuk selamanya. Keharaman ini didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nur ayat 6-9:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمِيسَةَ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَمِيسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika ia termasuk orang-orang yang dusta. Istrinya dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya ini termasuk orang-orang yang benar.”(Q.S An-Nur [24]: 6-9)<sup>82</sup>

e) **Wanita yang Haram Dinikahi Tidak untuk Selamanya (Larangan yang Bersifat Sementara)**

Wanita-wanita yang haram dinikah untuk selamanya (bersifat sementara) adalah sebagai berikut.

1. Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan; maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan. Apabila mengawini mereka berganti-ganti, seperti seorang laki-laki mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal atau

<sup>82</sup> Hasbi Ash-Shiddieqi, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h. 544.

dicerai, maka laki-laki itu boleh mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal dunia tersebut.

2. Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikah oleh seorang laki-laki.
3. Wanita yang sedang dalam idah, baik idah cerai maupun idah ditinggal mati berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 228-234.
4. Wanita yang ditalak tiga haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin serta dicerai oleh suami terakhir itu dan telah habis masa idahnya.
5. Wanita yang sedang melakukan ihram baik ihram umrah maupun ihram haji tidak boleh dikawini.
6. Wanita musyrik haram dinikah, maksud wanita musyrik ialah yang menyembah selain Allah swt.

#### **B. Pernikahan Beda Agama Dalam Hak Asasi Manusia**

Dalam pandangan HAM Pernikahan Beda Agama di Indonesia adalah masyarakat yang *plural*. Artinya, terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan kepercayaan. Hal ini menimbulkan berbagai dampak sosial salah satunya tentang perkawinan. Dalam hal ini, dampak sosial berusaha ditekan dengan munculnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan unifikasi dari seluruh hukum pernikahan yang ada di Indonesia. Permasalahan kemudian muncul, ketika pembatasan pernikahan atas dasar UU ini pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”*.

UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM di Indonesia, terdapat penjelasan tentang kebebasan beragama, juga terdapat kebebasan untuk menikah dan meneruskan keturunan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Akan tetapi dalam ayat selanjutnya dinyatakan bahwa perkawinan yang ditentukan menurut UU. Dengan demikian, hak untuk melaksanakan perkawinan dibatasi oleh UU Perkawinan. Sementara dalam Pasal 2 UU Perkawinan, perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal tersebut sering dianggap sebagai pelarangan terhadap perkawinan beda agama, karena perkawinan harus dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sedangkan tidak mungkin satu perkawinan dilaksanakan dengan dua upacara agama. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan perkawinan beda agama salah satu pihak hendaknya mengikuti agama pihak lain. Dapat disimpulkan bahwa kebebasan beragama di Indonesia belum dapat terlaksana sepenuhnya, karena telah terjadi pemaksaan oleh institusi perkawinan terhadap seseorang untuk memeluk agama tertentu guna melaksanakan perkawinan.

Dalam persoalan perkawinan beda agama bukanlah soal perbedaan agama itu sendiri, tetapi soal tanggung jawab negara dalam melindungi dan menjamin hak-hak warganya. Adapun yang dipersoalkan adalah soal relasi vertikal dalam hubungan antara negara dan warga negara, bukan soal relasi horiasontal yang menyangkut hubungan di antara warga negara yang beragam agama, kepercayaan dan beragam penafsirannya. Hal ini penting untuk diperhatikan karena persoalan

perkawinan beda agama dalam konteks Negara Indonesia adalah persoalan hukum, sementara tafsiran agama-agama tentang pernikahan beda agama adalah persoalan teologis dan tafsir-tafsir keagamaan. Karena Indonesia bukan negara agama, maka yang menjadi acuan adalah hukum nasional. Meskipun hukum nasional, seperti Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mendasarkan diri pada apa yang dikatakan dengan hukum agama, namun cenderung lebih terikat pada dasar filosofi bangsa yang Bhineka Tunggal Ika. Artinya, prinsip mengakui keragaman bangsa dan kemajemukan masyarakat haruslah menjadi dasar dari pembentukan dan pembuatan suatu hukum maupun undang-undang yang bersifat nasional.

### **1. Pengertian HAM**

HAM (Hak Asasi Manusia) adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya. Melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar hak asasi manusia yaitu Komnas HAM. Kasus pelanggaran ham di Indonesia memang masih banyak yang belum terselesaikan/tuntas sehingga diharapkan perkembangan dunia ham di Indonesia



dapat terwujud ke arah yang lebih baik.<sup>83</sup> Berikut ini pembagian bidang, jenis dan macam Hak Asasi Manusia :

1. Hak Asasi Pribadi (*Personal Right*)

- a. Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian dan berpindah-pindah tempat.
- b. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat.
- c. Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan.
- d. Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.

2. Hak Asasi Politik (*Political Right*)

- a. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan.
- b. Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.
- c. Hak membuat dan mendirikan parpol/partai politik dan organisasi politik lainnya.
- d. Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.

3. Hak Asasi Hukum (*Legal Equality Right*)

- a. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
- b. Hak untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil/PNS.
- c. Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum.

4. Hak Asasi Ekonomi (*Property Right*)

- a. Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli.
- b. Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak.

---

<sup>83</sup> *Pengertian, Macam dan Jenis Hak Asasi Manusia / Ham Yang Berlaku Umum*, tersedia <http://www.organisasi.org/1970/01/pengertian-macam-dan-jenis-hak-asasi-manusia-ham-yang-berlaku-umum-global-pelajaran-ilmu-ppkn-pmp-indonesia.html>, diakses pada tanggal 05 April 2018 pukul 16:53 WIB.

- c. Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll.
  - d. Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu.
  - e. Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.
5. Hak Asasi Peradilan (*Procedural Rights*)
- a. Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan.
  - b. Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.
6. Hak Asasi Sosial Budaya (*Social Culture Right*)
- a. Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan.
  - b. Hak mendapatkan pengajaran.
  - c. Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

## 2. Pengertian Pernikahan dalam HAM

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat. Dengan hidup bersama, kemudian melahirkan keturunan yang merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa.<sup>84</sup> Mengingat pentingnya peran hidup bersama, pengaturan mengenai perkawinan memang harus dilakukan oleh negara. Di sini, negara berperan untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita.

Seiring dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan yang terjadi semakin kompleks. Berkaitan dengan perkawinan, belakangan ini sering tersiar dalam berbagai media terjadinya perkawinan yang dianggap problematis dalam

---

<sup>84</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, rev.ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 3.

kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, perkawinan campuran<sup>85</sup>, perkawinan sejenis, kawin kontrak, dan perkawinan antara pasangan yang memiliki keyakinan (agama) yang berbeda. Walaupun perkawinan campuran dan perkawinan beda-agama sama sekali berbeda, bukan tidak mungkin pada saat yang sama perkawinan campuran juga menyebabkan perkawinan beda agama. Hal ini disebabkan karena pasangan yang lintas negara juga pasangan lintas agama.

Selain permasalahan yang berhubungan dengan pengakuan negara atau pengakuan dari kepercayaan/agama atas perkawinan, pasangan yang melaksanakan perkawinan tersebut seringkali menghadapi masalah-masalah lain di kemudian hari, terutama untuk perkawinan beda agama. Misalnya saja, pengakuan negara atas anak yang dilahirkan, masalah perceraian, pembagian harta ataupun masalah warisan. Belum lagi, dampak-dampak lain, seperti berkembangnya gaya hidup kumpul kebo atau hidup tanpa pasangan yang terkadang bisa dipacu karena belum diterimanya perkawinan beda agama.

Untuk mencegah terjadinya perkawinan beda agama yang masih belum diterima dengan baik oleh masyarakat, biasanya salah satu pihak dari pasangan tersebut berpindah agama atau mengikuti agama salah satu pihak sehingga

---

<sup>85</sup> Menurut pasal 57 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jadi perkawinan campuran bukanlah perkawinan antara yang dimaksudkan disini.

perkawinan beda agama ini. Salah satu pendapat mengatakan bahwa masalah agama merupakan masalah pribadi sendiri-sendiri.<sup>86</sup>

Sehingga negara tidak perlu melakukan pengaturan yang memasukan unsur-unsur agama. Namun, di pihak lain, ada yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama dilarang oleh agama sehingga tidak dapat diterima.<sup>87</sup>

### 3. HAM di Indonesia

Perkembangan HAM di Indonesia secara yuridis turut dicampuri oleh dunia Hukum Internasional. Sudah menjadi suatu konsekuensi logis, bahwa kemerdekaan Indonesia yang bermula dari penjajahan berabad-abad menghasilkan sikap nasionalis untuk mempertahankan hak atas rakyatnya. Di samping itu pengaruh doktrin barat atas HAM turut mengambil peran, hingga menghasilkan dasar Negara Indonesia, yaitu UUD 1945 yang dalam pembukaannya mengakui eksistensi HAM secara eksplisit.<sup>88</sup>

Berlandaskan pada dasar Negara tersebut, pengakuan atas HAM utamanya meliputi kemerdekaan, yaitu bebas yang bertanggung jawab. Lebih lanjut, dasar Negara tersebut menyatakan kewajiban Negara untuk memenuhi kesejahteraan masyarakatnya. Sudah menjadi suatu konsekuensi logis bahwa munculnya kewajiban akan menyertakan hak pada pihak lain, yang dalam konteks ini rakyat. Hal ini kemudian mampu menyamakan semangat dari konstitusi tersebut sebagai semangat dalam mendirikan *welfare state*, yaitu negara yang tujuannya untuk

---

<sup>86</sup> <http://hukumonline.com/detail.asp?idz=156&cl=Berita> di akses pada tanggal 30 April 2018.

<sup>87</sup> <http://www.kompas.com/di> akses pada tanggal 30 April 2018.

<sup>88</sup> *Undang-Undang Dasar R.I Tahun 1945*, (Surakarta: Pustaka Mandiri),h. 4.

mensejahterakan rakyatnya. Perlu diingat, bahwa dalam dasar negara ini, penambatan hak tersebut didasarkan pada sila ideologi Negara sebagaimana yang tercantum dalam paragraf keempat. Sehingga, hak apapun yang dimiliki, tidak bisa terlepas implementasi dan pertanggungjawabannya dari konteks Pancasila.

Pembukaan dari dasar Negara tersebut diimplementasikan dalam batang tubuh dasar Negara tersebut yaitu, dalam pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 129, pasal 30, pasal 32, pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan pasal 34 ditambah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM.

Indonesia kemudian meratifikasi piagam PBB sebagai sebuah undang-undang yang sah berlaku di Indonesia. Ratifikasi tersebut diwujudkan dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999. Ratifikasi ini dilakukan utamanya bukan karena Indonesia merupakan anggota PBB kala itu, melainkan terungkapnya beberapa kasus pelanggaran HAM berat saat pemerintahan Soeharto.<sup>89</sup>

Ratifikasi ini kemudian menimbulkan konsekuensi hukum bahwa seluruh pasal dalam DUHAM menjadi berlaku di Indonesia. Namun, dalam undang-undang 39 tahun 1999 ditambahkan konsep ketuhanan dalam pasal 1 tentang ketentuan umum mengenai pengertian HAM itu sendiri. Hal ini kemudian membatasi implementasi HAM yang harus berdasar ketuhanan.

Secara umum HAM di Indonesia meliputi: hak untuk hidup, hak berkeluarga, dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak

---

<sup>89</sup> Deni K. Yusup, Kodifikasi UU No.39 Tahun 1999, dimuat dalam <http://dkyusup.blogspot.com/2008/04/kodifikasi-uu-no-39-tahun-1999.html>, di akses pada tanggal 30 April 2018



memperoleh keadilan, Hak atas kebebasan pribadi (memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia), hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.

UDHR Pasal 6 (1) dinyatakan bahwa; *Men and women of full age without any limitation due to race, nationality, or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal right to marriage, during marriage and at its dissolution.* Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap laki-laki dan perempuan mempunyai hak untuk menikah dan membangun keluarganya, tanpa halangan adanya perbedaan ras, kebangsaan atau kewarganegaraan, dan perbedaan agama. Dengan demikian perbedaan agama bukan merupakan penghalang untuk menikah. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 GHR bahwa perbedaan agama, bangsa atau asal sama sekali bukanlah menjadi halangan untuk perkawinan.

Pasal 18 (a) deklarasi anti diskriminasi agama dinyatakan bahwa; *every person is entitled to marry, to found a family and to bring up children in conformity with his religion, traditions, and culture.* (Mahmood, 1993: 171). Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menikah, membangun keluarga untuk mengarahkan anak-anaknya kepada agama, tradisi dan budayanya.

UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM di Indonesia, terdapat penjelasan tentang kebebasan beragama, juga terdapat kebebasan untuk menikah dan meneruskan keturunan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Akan tetapi dalam ayat selanjutnya dinyatakan bahwa perkawinan yang ditentukan menurut UU. Dengan demikian, hak untuk melaksanakan perkawinan dibatasi oleh UU Perkawinan. Sementara dalam Pasal 2 UU Perkawinan, perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal tersebut sering dianggap sebagai pelarangan terhadap perkawinan beda agama, karena perkawinan harus dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sedangkan tidak mungkin satu perkawinan dilaksanakan dengan dua upacara agama. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan perkawinan beda agama salah satu pihak hendaknya mengikuti agama pihak lain. Dapat disimpulkan bahwa kebebasan beragama di Indonesia belum dapat terlaksana sepenuhnya, karena telah terjadi pemaksaan oleh institusi perkawinan terhadap seseorang untuk memeluk agama tertentu guna melaksanakan perkawinan.

#### **4. HAM dalam Islam**

Hak Asasi Manusia dalam Islam bersifat *teosentris*, artinya segala sesuatu berpusat kepada Tuhan. Pandangan Islam bahwa Tuhan sangat dipentingkan. A.K Brohi menyatakan pendekatan Islam berbeda dengan pendekatan Barat. Dimana strategi Islam sangat mementingkan penghargaan kepada hak-hak asasi dan

kemerdekaan dasar manusia sebagai sebuah aspek kualitas dari kesadaran keagamaan yang terpatrit di dalam hati, pikiran, dan jiwa penganutnya.

Hubungan antara Islam dan hak asasi manusia, terletak pada universalitas ajaran Islam. Universalitas hak asasi manusia telah digaransi di dalam prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang berasal dari teks-teks suci maupun konstruksi pemikirn ulama.<sup>90</sup>

HAM dalam Islam secara substantif terdapat dalam ajaran agama Islam itu sendiri, yang dalam konteks ini mewajibkan seseorang untuk menghargai hak orang lain. Seperti ajaran dilarang membunuh, dilarang mencuri, dan sebagainya. Kodifikasi tentang HAM dimulai dari munculnya piagam Madinah, yaitu perjanjian semacam kontak politik antara Rosulullah Muhammad SAW dengan penduduk Madinah yang menempatkan Rasul sebagai pemimpinnya.

HAM yang terkandung dalam Piagam Madinah dapat dibagi menjadi tiga hal, yaitu hak untuk hidup, hak dalam kebebasan, dan hak mencari kebahagiaan. dari pembahsan tersebut, dapat disimpulkan bahwa agama Islam mengakui konsep hak yang melekat dari manusia yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Hal ini menimbulkan konsekuensi logis, bahwa Tuhanlah yang boleh mentapkan mana yang bisa dimiliki haknya oleh manusia dan mana yang tidak. Secara substantif, HAM dalam Islam lebih diarahkan pada implementasi kewajiban asasi manusia, yaitu keharusan manusia untuk tidak melakukan sesuatu pada manusia lainnya. Dalam hal ini, pedoman melakukannya terdapat dalam agama Islam itu

---

<sup>90</sup> Jurnal Al-Adalah Vol.12, No. 2 (2015) *Penegakan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam*

sendiri, sedangkan kodifikasi khususnya terdapat pada piagam Madinah yang merumuskan hak-hak yang dapat diperoleh oleh umat manusia.



### **BAB III**

## **PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA**

### **A. Pernikahan Beda Agama dalam Hukum Indonesia**

Pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 mengatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam penjelasannya selanjutnya disebutkan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan undang-undang dasar 1945.<sup>91</sup>

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan pula bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.<sup>92</sup> Dalam penjelasan ayat (3) pasal 2, pasal tersebut dikatakan bahwa ketentuan khusus yang menyangkut tata cara pencatatan yang diatur dalam berbagai peraturan merupakan pelengkap bagi pasal 3 sampai pasal 9 peraturan pelaksanaan.

Dalam pasal 3 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendak itu, baik secara lisan maupun secara tertulis, kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, sedangkan ketentuan

---

<sup>91</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 h. 32.

<sup>92</sup> *Ibid*, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 h 33.



di luar tersebut (10 hari kerja) dapat meminta izin kepada camat atas nama bupati, apabila alasan ada alasan-alasan yang dirasa penting.<sup>93</sup>

Pemberitahuan kehendak melansungkan perkawinan tersebut harus memuat nama, umur, agama/kepercayaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.

Menurut pasal 6 Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, pegawai pencatat selain meneliti tentang apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang, juga harus meneliti pula:

1. Kutipan akta kelahiran calon mempelai.
2. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orangtua calon mempelai.
3. Izin tertulis/ izin pengadilan sebagai dimaksud didalam pasal 6 ayat(2), (3), (4), (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
4. Izin pengadilan/ pejabat sebagai dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
5. Dispensasi pengadilan/pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
6. Surat kematian isteri/suami atau surat keterangan perceraian bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.

---

<sup>93</sup> *Ibid.* h. 34

7. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh MENHANKAM PANGAB apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya adalah anggota Angkatan Bersenjata.
8. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting sehingga mewakilkan kepada orang lain.<sup>94</sup>

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan, serta tidak ada halangan perkawinan, pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dikantor pencatatan perkawinan pada tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Dalam pasal 9 selanjutnya diatur mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam pengumuman tersebut. Kemudian di dalam pasak 10 dan 11 diatur tentang tata cara perkawinan. Menurut pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 perkawinan dapat dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman sesuai dengan tata cara perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, di hadapan Pegawai Pencatatan dengan dihadiri oleh 2 orang saksi.

Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan, keduamempelai menandatangani akta perkawinan yang kemudian diikuti oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat serta oleh wali nikah atau wakilnya bagi perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam<sup>95</sup>. Dengan menandatangani akta perkawinan tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

---

<sup>94</sup> Muhammad Amin Summa, *Undang-Undang Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). h. 208.

<sup>95</sup> *Ibid*, h. 210.

Dalam praktek Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 belum secara menyeluruh dan lengkap mengatur tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974. Berdasarkan hal tersebut, pegawai catatan sipil dapat mengambil kebijakan dengan cara tidak hanya memberlakukan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang sudah ada dan lengkap peraturan pelaksanaannya.

Oleh karena itu untuk menjaga kekosongan hukum, mereka bukan hanya memberlakukan peraturan lama sepanjang tidak diatur dalam dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, melainkan juga tepat menerapkan peraturan lama yang walaupun sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tetapi peraturan pelaksanaannya belum ada atau belum lengkap. Seperti halnya dalam pelaksanaan perkawinan, Catatan Sipil masih ada sampai sekarang berfungsi sebagai pelaksana perkawinan. Hal itu berarti bahwa perkawinan yang hanya dilakukan di Catatan Sipil saja sudah dianggap sah.

Dengan demikian, apakah pelaksanaan perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, kami berpendapat bahwa “Sampai sekarang belum pernah ada keputusan pengadilan yang membatalkan ataupun menyatakan tidak sah perkawinan yang dilakukan di Catatan Sipil tersebut.”<sup>96</sup>

Pihak Catatan Sipil memang menyadari bahwa pelaksanaan perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang

---

<sup>96</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2000). h 35.

No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1975, tetapi keadaan mendorong mereka berbuat demikian. Sehingga sering kali pihak gereja atau agama lain belum mau memberkati atau melaksanakan perkawinan sebelum dilaksanakan di Catatan Sipil. Hal ini dapat dibenarkan apabila “Pihak gereja merasa tidak berwenang untuk memberkati suatu perkawinan, sebelum perkawinan dilaksanakan di Catatan Sipil”.<sup>97</sup>

Menurut kenyataan di lingkungan masing-masing agama (yaitu agama Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha) telah ada orang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tersebut. Dengan adanya pengangkatan tersebut, pejabat agama yang bersangkutan telah berfungsi rangkap, baik sebagai pejabat agama maupun sebagai wakil Pejabat Negara. Oleh karena itu perkawinan yang dilaksanakan dihadapan pejabat agama tersebut berarti telah sah baik menurut hukum agama maupun menurut hukum Negara.

Dalam hal ini perlu diketahui bahwa karena pejabat agama itu hanya merupakan sebagai wakil pejabat negara, maka mereka hanya berhak untuk menyaksikan perkawinan dan memberikan surat keterangan bahwa perkawinan benar-benar telah dilaksanakan. Surat keterangan itu kemudian diserahkan oleh kantor Catatan Sipil setempat untuk diganti dengan “akta perkawinan”.<sup>98</sup>

Berlainan dengan kantor Catatan Sipil dan kantor Departemen Agama, tidak hanya terdapat kesulitan untuk menerapkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya dalam praktek.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup> Sudirman Tebba., *Ibid*, h. 24.

<sup>98</sup> *Ibid*, h.29

<sup>99</sup> *Ibid*, h.36

Hal ini disebabkan karena bagi mereka yang beragama Islam, disamping peraturan lama masih banyak yang tetap berlaku, juga dengan adanya beberapa peraturan yang dikeluarkan setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu seperti Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975, Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1975, dan Instruktur Dir. Jen. Bimas Islam No. D/INS/117/1975.<sup>100</sup>

Dalam praktek, bahwa perkawinan antar agama masih banyak dilaksanakan di kantor Catatan Sipil setempat. Hal demikian, oleh karena hanya kantor Catatan Sipil tersebut yang mau melaksanakan perkawinan antar agama itu. Kantor Departemen Agama setempat belum mau melaksanakan perkawinan antar agama, oleh karena belum adanya kata sepakat dari para ahli hukum Islam tentang halal tidaknya perkawinan antar agama tersebut.

Sehingga Catatan Sipil setempat mau melaksanakan perkawinan antar agama hanyalah berdasarkan kebijakan yang mereka ambil sendiri, dengan dasar pemikiran “ dari pada mereka hidup bersama diluar perkawinan, lebih baik Catatan Sipil meresmikannya saja”. Dan memang kenyataan sampai sekarang belum pernah ada keputusan pengadilan yang membatalkan atau pun menyatakan tidak sah perkawinan antar agama yang dilakukan di kantor Catatan Sipil tersebut. Di dalam prakteknya, masyarakat juga beranggapan bahwa perkawinan yang dilakukan di kantor Catatan Sipil sudah sah menurut hukum negara, dan pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya masing-masing diserahkan

---

<sup>100</sup> *Ibid*, h.38.



kepada kehendak pihak-pihak yang bersangkutan, yang menurut mereka hanyalah menyangkut hukum agamanya saja.

Formalitas dan syarat-syarat yang diperlukan untuk perkawinan antar agama, sama dengan formalitas dan syarat-syarat yang diperlukan bagi “perkawinan biasa” (yaitu perkawinan bagi mereka yang bukan beragama Islam) yang dilakukan di kantor Catatan Sipil tersebut.

Untuk melangsungkan perkawinan antar agama, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka yang biasanya menjadi masalah adalah untuk mendapatkan “Surat Keterangan Agama” bagi orang-orang yang hendak melakukan perkawinan antar agama yang dilarang oleh agamanya.<sup>101</sup>

Bagi wanita Islam yang mau kawin dengan pria yang bukan Islam, dalam praktek tidak pernah mendapat surat keterangan atau pun dispensasi dari pegawai Pencatat Nikah di kantor Departemen Agama. Sehingga jalan satu-satunya bagi wanita Islam tersebut adalah: “ Berdasarkan pasal 60 ayat 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 18 Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975 menjadikan Surat tolakan dari Departemen Agama sebagai dasar untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Apabila ternyata penolakannya itu tidak beralasan, maka Pengadilan Agama memberikan keputusan sebagai pengganti surat keterangan tersebut.

Bagi pria Islam, dapat tidaknya ia memperoleh surat keterangan agama itu, tergantung pada pendapat/pandangan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang

---

<sup>101</sup> *Ibid*”, h. 37

untuk itu, tentang diperbolehkan atau tidaknya pria Islam menikah dengan wanita yang bukan Islam. Apabila Pegawai Pencatat Nikah menolaknya, maka bagi pria Islam itu juga jalan satu-satunya adalah menjadikan surat tolakan tersebut sebagai dasar untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama.

Untuk orang-orang yang beragama Katholik, mereka akan dapat memperoleh surat Keterangan Agama apabila dia mau berjanji untuk tetap setia kepada keyakinannya dan bersedia untuk mendidik anak-anaknya secara Katholik. Bagi mereka yang beragama Protestan tidak ada persoalan, karena gereja Protestan tidak melarang umatnya melakukan perkawinan antar agama.

Bagi mereka yang beragama Hindu dan Budha, walaupun agamanya melarang perkawinan antar agama, dalam prakteknya tidaklah terlalu sulit untuk mendapatkan Surat Keterangan Agama. Pihak Agama Hindu akan memberi surat keterangan yang diperlukan apabila calon mempelai berjanji untuk saling setia satu sama lain, dan “ Agama Hindu melarang perkawinan antar agama hanya dalam hal perkawinan itu ingin dilaksanakan menurut agama Hindu, agama Hindu tidak akan menghalang-halangi umatnya untuk melakukan perkawinan menurut agama lain ataupun di Kantor Catatan Sipil”.<sup>102</sup>

Dalam hal ini perlu diketahui bahwa walaupun pihak agama Hindu bersedia memberi Surat Keterangan Agama, tetapi perkawinan yang hanya dilakukan di Catatan Sipil tetap dianggap tidak sah menurut agama Hindu, dan perkawinan antar agama tersebut tidak dapat disahkan menurut agama Hindu.

---

<sup>102</sup> *Ibid.* h. 38.

Agama Islam juga menganggap tidak sah perkawinan antar seorang Islam dengan seorang bukan Islam yang hanya dilaksanakan di Catatan Sipil saja, karena dalam pernikahan tersebut terdapat suatu ketiadaan prinsip yang justru dijadikan sebagai kunci halalnya wanita bagi seorang laki-laki, yaitu: “Kalimatullah” yang diucapkan oleh wali dan diterima oleh bakal suami dihadapan dua saksi yang adil.

Oleh karena itu apabila perkawinan antar agama tersebut sah menurut hukum Islam, maka perkawinan harus juga dilaksanakan menurut hukum Islam. Bilamana pelaksanaan upacara juga dilaksanakan menurut agama lain, peraturan Islam mensyaratkan supaya upacara keagamaan menurut agama Islam dilakukan yang terakhir, dengan maksud supaya yang beragama Islam tidak murtad.

Agama Katholik dan Protestan juga menganggap perkawinan juga tidak sah sebelum dilakukan menurut aturan agama itu masing-masing. Agama Islam menyerahkan hal tersebut kepada kehendak pihak-pihak yang bersangkutan. Bagi mereka yang beragama Protestan, gereja tidak mau melangsungkan perkawinan sebelum perkawinan dilakukan di Catatan Sipil. Sedangkan bagi mereka yang beragama Khatolik, perkawinan harus dilaksanakan terlebih dahulu di Gereja.<sup>103</sup>

Pada pasal 26 kitab Undang-Undang hukum perdata dan pasal 1 Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen mengatur bahwa nikah itu oleh undang-undang hanya yang diperhatikan perhubungan sipilnya ( hubungan perdata) saja.<sup>104</sup>

Pemikiran tentang pemisahan antara *civil marriage* dengan *religious marriage* yang sangat dipengaruhi oleh hukum berdasarkan pengaruh hukum

---

<sup>103</sup> *Ibid*, h. 38

<sup>104</sup> Ihtiyanto, *Perkawinan Campuran dalam Negara RI*, (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Depag, 2003). h. 67.

barat. Pasal 26 kitab Undang-Undang hukum perdata dan pasal 1 Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen di atas mempunyai maksud bahwa perkawinan yang tunduk pada hukum tersebut, sah atau tidaknya bergantung pada apakah perkawinan itu memenuhi syarat-syarat yang tertulis dalam undang-undang atau tidak, sedang syarat-syarat menurut agama dikesampingkan.

Jadi dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan antar agama tidak diatur, karena perkawinan tersebut tidak dibenarkan ajaran agama, yaitu ada halangan terjadinya perkawinan bagi calon suami dan calon isteri perbedaan agama, hal ini sesuai dengan yang dikehendaki pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 Undang-Undang perkawinan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan menyatakan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pasal 2 Undang-Undang perkawinan ini terang menunjuk paling pertama kepada hukum masing-masing agama dan kepercayaannya bagi masing-masing pemeluknya. Sedangkan menurut hukum penjelasan pasal 2 itu, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang dasar 1945. Oleh Prof. Dr. Hazairin. S.H., ditegaskan bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agama sendiri.<sup>105</sup>

Tidak ada lagi perkawinan yang dilakukan hanya menurut hukum agama dan kepercayaannya itu saja atau hanya dilakukan pencatatannya saja tetapi tidak berlangsung menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, mengingat Undang-

---

<sup>105</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, PT.Bumi Aksara1999), h. 190.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaan yaitu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti tersebut diatas. Pasal 1 dan 2 itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Demikian juga fatwa Majelis Ulama Indonesia DKI Jaya tanggal 30 September 1986 Tentang Perkawinan antar agama berdasarkan pendapat dalam sidang pleno tanggal 2 Agustus 1986 dan tanggal 30 September 1986 berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional Ke II Majelis Ulama Indonesia tanggal 1 Juni 1980 yang menganjurkan (dilarang perkawinan antara wanita Muslim dengan laki-laki Musyrik dan laki-laki Muslim dilarang kawin dengan wanita yang bukan beragama Islam (larangan mutlak). Lihat juga Keputusan Seminar perkawinan antar agama di Universitas Katolik Atmajaya tanggal 21 maret 1987, pada prinsipnya gereja melarang perkawinan Campur antar agama ( KHK 1086 dan KHK 112 ).<sup>106</sup>

#### **B. Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Positif**

Sejak orde baru, sebagian produk penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia terkesan semakin menjauh dari roh ideologi bangsa, bahkan sebagian orang mengatakan cacat ideologis. Cacat ideologis dimaksud adalah sebagian produk undang-undang dan peraturan pelaksanaannya hingga aturan daerah di daerah-daerah terkesan tercerabut dari fakta keberagaman sosial,

---

<sup>106</sup> *Ibid*, h. 195.



budaya, agama, suku bangsa, dan norma-norma lokal nusantara yang menjadi karakter masyarakat asli yang dimiliki bangsa Indonesia.<sup>107</sup>

Pernikahan diatur di Indonesia bahkan sebelum Indonesia merdeka, yaitu diatur dalam Undang-Undang peninggalan penjajah. Setelah merdeka, dan Indonesia menganut ideologi Pancasila. Peraturan yang menganut mengenai pernikahan diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dengan beberapa tahap sebelum disahkan. Pernikahan antar pemeluk agama tidak diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.<sup>108</sup> Pernikahan beda agama merupakan salah satu permasalahan yang mengalami pro kontra yang tak kunjung usai. Mereka yang memilih hidup dengan pasangan beda agama merasa termarginalkan dengan peraturan yang ada di Indonesia padahal diberi kebebasan dengan adanya pasal 35 Adminduk. Dan mereka yang mengupayakan eksistensi dan legalitas ke MK dengan judicial review. Maka sebelum itu, akan dijabarkan beberapa hal yang mendukung yaitu :

### **1. Hukum Pernikahan yang Berlaku di Indonesia**

Perkawinan merupakan salah satu ajaran penting dalam syari'at sehingga mendapat perhatian khusus dari kalangan ulama dan politikus muslim Indonesia. Sebelum merdeka, di Indonesia sudah ada dua lembaga perkawinan yang eksis yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama (PA), namun

---

<sup>107</sup> Satya Arianto dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum dari Konstitusi sampai Implementasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), h.38

<sup>108</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada; 2013)h.273

keduanya masih memerlukan hukum materil dan formal. Sejak kemerdekaan, usaha pembentukan UU Perkawinan telah dilakukan.<sup>109</sup>

Pada zaman kemerdekaan, telah dibentuk enam undang-undang yang secara langsung mengatur Peradilan Agama (struktur dan kekuasaanya), yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1952 tentang Peraturan untuk menghadapi kemungkinan hilangnya Surat Keputusan dan Surat Pemeriksaan Pengadilan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk diseluruh daerah Luar Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang ini diikuti dengan pemberlakuan sejumlah Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Keputusan Mahkamah Agung, termasuk Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Tahun 1974 merupakan terbentuknya unifikasi tentang perkawinan yang ditandai dengan Undang-Undang No.01 Tahun 1974 tentang Perkawinan ( selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan). Sebelum berlakunya UU Perkawinan ini, di Indonesia terdapat bermacam-macam peraturan yang mengatur

---

<sup>109</sup> Jaih Mubarak, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung; Simbiosis Rekatama Media., h.53

perkawinan bagi golongan masyarakat, mulai dari hukum adat sampai hukum Agama.<sup>110</sup>

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka teori *receptie* seperti yang diajarkan di zaman Hindia Belanda menjadi hapus sendirinya. Teori *receptie* adalah teori yang menyatakan bahwa Hukum Islam baru berlaku di Indonesia untuk penganut agama Islam, apabila sesuatu hukum Islam telah nyata-nyata diresepsi oleh hukum Adat. Adanya pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Perkawinan ini menghilangkan keragu-raguan untuk menerima bahwa Hukum Islam telah langsung menjadi sumber hukum tanpa memerlukan bantuan atau peraturan Hukum Adat.<sup>111</sup>

Munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut Mahadi, telah sampailah teori “iblis” *receptie* tersebut. Ia mengutip pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”. Dengan demikian, hukum agama Islam menjadi sumber hukum yang langsung tanpa harus melalui adat dalam menilai apakah suatu perkawinan sah atau tidak. Jadi secara yuridis formal, hukum Islam dalam perkawinan dan segala akibat hukum yang ditimbulkannya telah berlaku.<sup>112</sup>

Mengenai berlakunya Hukum Islam di Indonesia dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, maka sejak 1

---

<sup>110</sup> Jurnal Citi Hukum. Vol.II No.2 Desember 2015. ISSN: 2356-1440, h.290

<sup>111</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2011), h.166

<sup>112</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h.20

Oktober 1975 hanya ada satu peraturan perkawinan yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa melihat golongannya masing-masing. Hal ini dengan tegas disebut pasal 66 Undang-Undang Perkawinan yang menentukan dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesier Stb.1933 November. 74), Peraturan Ordonantie Campuran, Gerelings op Desember Gemeente Huwelijk Stb. 1939 November 158, dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>113</sup>

Disamping ketentuan tersebut diatas tentang masih tetap berlakunya hukum Perkawinan Islam bagi mereka yang beragama Islam, secara tegas disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dengan demikian maka hal-hal yang belum diatur dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan ini, tetap berlaku menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.<sup>114</sup>

Sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Daud Ali, bahwa UUP yang mulai berlaku 1 Oktober 1975 mempunyai 3 (tiga) ciri khas dibandingkan dengan Undang-Undang atau hukum perkawinan sebelumnya, yaitu :<sup>115</sup>

---

<sup>113</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta; UII Press Yogyakarta, h.168

<sup>114</sup> *Ibid*

<sup>115</sup> Nurul Hakim, t.t, *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif UU No.1 Tahun 1974 dan PP No.10 Tahun 1983*, t.t, h,3

- 1) Asasnya bahwa dalam UUP asasnya adalah agama, agama atau hukum agama yang dipeluk oleh seseorang yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pasal 2 (1) : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”
- 2) Tujuannya sesuai dengan pasal 1 bahwa “Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia itu dalam penjelasannya berkaitan erat dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan (keturunan yang menjadi hak dan kewajiban (kedua) orang tua.
- 3) Sifatnya, yakni mengangka harkat dan dengan (kedudukann) kaum wanita yakni para istri dengana danya ungkapan jelas dalam Undang-Undang tersebut bahwa hak dan kedudukan suami adalah seimbang dengan hak dan kedudukan istri dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Sehubungan dengan adanya ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) tersebut diatas, maka bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam apabila hendak melakukan perkawinan supaya sah harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur dalam Hukum Perkawinan Islam. Demikian juga wajib bagi mereka yang beragama Nasrani, Hindu dan Budha, hukum agama merekalah yang menjadi dasar pelaksanaanya yang menemtukan sahnya perkawinan.<sup>116</sup>

Persoalan yang muncul adalah perkawinan antara mereka yang berbeda agama, sebab pelaksanaan perkawinan bagi yang berbeda agama tidak ada ketentuan baik dalam Undang-Undnag Perkawinan maupun dalam peraturan

---

<sup>116</sup> Abdul Ghofur Anshory, *Op.Cit.*, h.179



pelaksanaanya. Dengan melihat ketentuan pasal 2 ayat (1) tersebut diatas, maka sebetulnya tujuan diadakan ketentuan tersebut diatas adalah untuk menghindari konflik hukum adat, antar hukum agama dan hukum golongan lain.<sup>117</sup>

Melihat pasal 40 dan 44 Kompilasi Hukum Islam yang perlu diperhatikan adalah bunyi pasal 2 Undnag-Undnag Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, adalah merupakan hasil ijtihad atau inovasi hukum dalam menafsirkan ketentuan Al-Qur'an yang bersifat kolektif, ia merupakan hukum yang harus dipedomi bagi umat Islam Indonesia. Walhasil, perkawinan antar pemeluk agama Islam dan non-Islam tidak diperbolehkan secara hukum Islam. Karena ia jelas-jelas termasuk suatu bentuk halangan perkawinan.<sup>118</sup>

Apabila terjadi perkawinan antara dua orang yang berbeda agama, maka terlebih dahulu harus diadakan pemilihan agama dan kepercayaan yang mereka peluk. Tanpa menentukan sikap atas agama dan kepercayaan lebih dahulu, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) tidak mungkin sekaligus dipergunakan dua ketentuan hukum agama dan kepercayaannya.<sup>119</sup> Karena bagaimanapun sifat universalnya aturan agama, antara satu dengan yang lain tentu mempunyai perbedaan-perbedaan dan kaidah hukum yang mengatur tatacara, persyaratan dan rukun-rukun yang melandasi upacara perkawinan di antara agama-agama tadi. Sedang penentuan sah tidaknya perkawinan ditentukan oleh agama masing-

---

<sup>117</sup> Ibid.,

<sup>118</sup> Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, H.276

<sup>119</sup>Yahya harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No.1/1974*, (Medan: CV.Zahir Trading, 1975) h. 14

masing. Oleh karena itu jika terjadi perkawinan diantara dua pihak yang berlainan agama dan kepercayaannya mau tidak mau mereka harus menentukan pilihan salah satu agama dari kelainan agama yang mereka peluk.<sup>120</sup>

a. Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dengan kata lain, tafsiran dan penjabaran sudah dilakukan oleh MUI, Muhamaddiyah, NU, dan Persis.<sup>121</sup>

Pada 1991 telah diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam dengan intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan KHI untuk dijadikan pedoman bagi pihak-pihak yang memerlukan. KHI pada dasarnya merupakan penguatan terhadap keputusan ormas Islam mengenai pernikahan beda agama.<sup>122</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa seorang laki-laki yang beragama Islam dilarang menikah dengan perempuan karena salah satu dari tiga alasan :

- 1) Perempuan yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan laki-laki lain;
- 2) Perempuan yang bersangkutan masih berada dalam waktu tunggu iddah; dan
- 3) Perempuan yang bersangkutan tidak beragama Islam.

---

<sup>120</sup> *Ibid*,

<sup>121</sup> *Ibid*.,

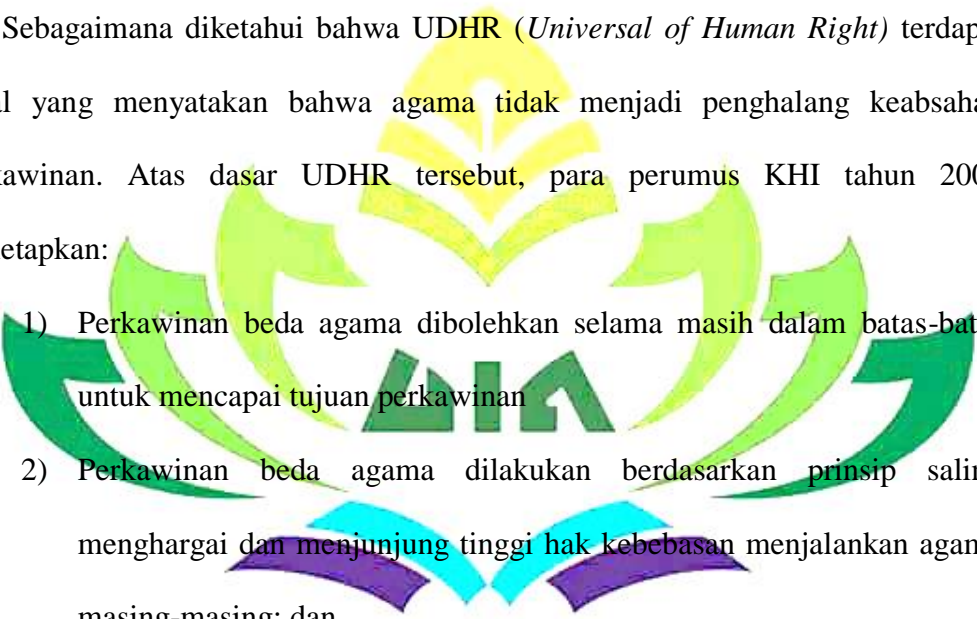
<sup>122</sup> Jaih Mubarak, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung; Simbiosis Rekatama Media., h.123

KHI dapat dipahami memberi ketentuan bahwa seorang laki-laki muslim diharamkan menikah dengan perempuan yang bukan muslimah (termasuk ahli kitab).<sup>123</sup> Dalam KHI juga ditetapkan bahwa perempuan yang beragama Islam diharamkan menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam.

b. Perkawinan Beda Agama Menurut Draf Kompilasi Hukum Islam Tahun 2004

Pada tahun 2004, Departemen Agama (Sekarang; Kementerian Agama) yang di motori oleh Siti Musdah Mulia dan kawan-kawan telah menghasilkan Draf Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi.

Sebagaimana diketahui bahwa UDHR (*Universal of Human Right*) terdapat pasal yang menyatakan bahwa agama tidak menjadi penghalang keabsahan perkawinan. Atas dasar UDHR tersebut, para perumus KHI tahun 2004 menetapkan:

- 
- 1) Perkawinan beda agama dibolehkan selama masih dalam batas-batas untuk mencapai tujuan perkawinan
  - 2) Perkawinan beda agama dilakukan berdasarkan prinsip saling menghargai dan menjunjung tinggi hak kebebasan menjalankan agama masing-masing; dan
  - 3) Kedua calon mempelai perlu memperoleh pengertian dan penjelasan mengenai perkawinan beda agama sehingga menyadari segala kemungkinan yang akan terjadi akibat perkawinan tersebut, sebelum perkawinan dilangsungkan.<sup>124</sup>

---

<sup>123</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 44.

<sup>124</sup> Draf KHI Tahun 2004 Pasal 49 ayat 1-3.

## 2. Gambaran Pernikahan Beda Agama di Indonesia

Pernikahan Beda Agama di Indonesia bisa dilihat dari maraknya Penyelundupan hukum hingga yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu :

### a. Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama di Indonesia

Guru besar hukum perdata Universitas Indonesia, Wahyono Darmabrata menjabarkan ada empat cara penyelundupan hukum yang ditempuh pasangan beda agama. Empat cara tersebut adalah :

- 1) Meminta penetapan pengadilan
- 2) Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama
- 3) Pendudukan sementara pada salah satu agama, dan
- 4) Menikah diluar negri.<sup>125</sup>

Tidak adanya pengaturan perkawinan beda agama secara tegas dan eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan termasuk pencatatannya mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum. Apabila benar-benar terjadi kasus seperti itu, maka status hukum perkawinan tersebut menjadi tidak jelas.<sup>126</sup>

Alhasil mulai dari pabrik figur sampai para penganggur, dari kalangan selebritis sampai para pengemis berbondong-bondong melakukan pernikahan beda agama. Bahkan tidak tanggung Ahmad Nurcholish, aktivis LSM Pusat Studi Agama dan Perdamaian (ICRP) telah melangsungkan perkawinan beda agama.

Pada tahun 1980, sebanyak 2467 pasangan di Indonesia melakukan pernikahan beda agama. Selanjutnya pada tahun 1990, sebanyak 26688 pasangan

---

<sup>125</sup> Abdul Syukur dan Tim Hukumonline.com, *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Di Indonesia*, Cet. 1. Jakarta : Lentera Hati., h.56

<sup>126</sup> Jurnal Cita Hukum. Vol.2 Desember 2015.ISSN: 2356

di indonesia melakukan hal yang demikian. Serta hasil terbaru pada tahun 2000, 2673 pasangan di data sebagai pihak yang melakukan pernikahan beda agama.

### Tabel

**Angka PBA Menurut Agama, Tahun dan Jenis Kelamin**

	1980		1990		2000	
Agama	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita
1. Islam	0.7	0.6	0.9	0.9	0.5	0.6
2. Protestan	6.0	8.6	10.6	13.8	5.1	3.6
3. Katolik	13.3	15.4	11.4	8.7	6.9	13.0
4. Hindu	19.0*	9.6*	16.3	2.7	60.0	-
5. Budha	-	-	37.5	21.9	-	-
6. Lain-lain	-	-	35.5	0	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>24677</b>	<b>24677</b>	<b>28668</b>	<b>28668</b>	<b>2673</b>	<b>2673</b>

\*Untuk SP-80, Hindhu, Budha dan lain-lain disatukan untuk analisis.

**Sumber: Sensus 1980, 1990 dan 2000**

Sejalan dengan perkembangan hukum perkawinan melihat kejadian masyarakat tentang fenomena sosial yang menjadi peristiwa hukum terkait dengan maraknya pemberitaan, baik melalui media televisi, radio, online maupun media cetak, ada beberapa contoh kasus yang melakukan pernikahan beda agama, yang diantaranya, **Contoh-contoh kasus Perkawinan beda agama yang terjadi di**

**Indonesia :**

- 1) Asmirandah dan Jonas Vanno

Ada perbedaan antara pernyataan Asmirandah dan Jonas, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2013 tidak terjadi apa-apa. Namun fakta-fakta pernikahan sebagaimana dikemukakan oleh Sobari seorang petugas PPN yang bekerja mulai tahun 1980 menyatakan; memastikan pernikahan tersebut memang benar, yakni



pada hari kamis, 17 Oktober 2013, jam 09.00 wib. Mengenai kabar Jonas telah masuk Islam, Sobari tidak tahu persis, namun ia mendapatkan informasi yang berkembang telah di Islamkan oleh Ustad Mahari Madarif dari Masjid An Nur pada agustus Tahun lalu.<sup>127</sup>

Fakta lainnya, bahwa mereka berdua, menurut Hj.Suhermi, bahwa anda telah melakukan pendaftaran pernikahan sejak tanggal 10 Oktober Tahun 2013. Kemudian memastikan bahwa tanggal 17 Oktober 2013 mereka telah menikah sesuai dengan surat keterangan yang tercatat register kearsipan di Kelurahan tanah Baru Depok Jawa Barat.

Fakta lain terkait dengan pelaksanaan pernikahan antara Asmirandah dan Vanno menjadi tidak jelas, ketika ditelusuri melalui pendapat Saiful Miftah seorang pegawai KUA Beji Depok membantah bahwa tidak ada pernikahan pada tanggal 17 Oktober 2013, bahkan yang ia tahu rencana pernikahan pada tanggal 10-11 Januari 2014. Perbedaan pendapat ini lebih mengarah kebenarannya pendapat Hj.Suhermi, mengingat datanya jelas, sedang pendapat kedua hanya seorang pegawai KUA dan bukan seorang pengambil kebijakan atau kepala KUA atau Humas dari KUA tsb. Hal ini dipertanggungjawabkan berkaitan dengan penyampaian informasi terkait persoalan pernikahan di lingkungan wilayah hukum KUA Beji Kabupaten Depok.<sup>128</sup>

---

<sup>127</sup> Jurnal Al-Adalah, Vol. XII, No.2, Desember 2014, *Kritik Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fakta Hukum Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Depok Jawa Barat* oleh M.Wagianto Bandar Lampung : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.h.2

<sup>128</sup> *Ibid*

Menceramati kasus antara Asmirandah dengan Jonas Rivanno yang telah memasuki babak pengajuan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Depok. Bahwa Asmirandah melalui kuasa hukumnya pada tanggal 7 November 2013 mengajukan pembatalan pernikahan dengan nomor registrasi perkara No.2390/pdt/g/2013/-PA.dpk. Hal ini setelah diterima oleh Entoh Abdul Fatah, Panitera Pengadilan Agama Depok. Sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh suryadi selaku juru bicara PA Depok bahwa membenarkan adanya gugatan pembatalan pernikahan dengan alasan Andah merasa tertipu. Terkait pengaduannya, maka telah digelar Rabu, 27 November 2013 di PA Depok, tetapi tidak dihadiri oleh Andah yang hanya menunjuk pengacaranya Afdal Zikri dan Jonas diwakili Muhammad Nuzul Wibawa.

Pada perkembangan selanjutnya dalam kurun waktu setahun, pada tahun 2014 terjadi perubahan status perkawinan mereka. Bahwa Asmirandah malah pindah agama, oleh karena itu fenomena ini menjadi peristiwa hukum yang mengusik rasa keadilan, kepastian hukum. Juga ketidak berdayaan Pengadilan Agama Depok menuntaskan persoalan ini. Bahwa peristiwa ini menjadi pembiaran tanpa adanya sanksi baikl adanya putusan pengadilan ataupun sanksi moral terhadap pasangan Jonas dan Asmirandah.<sup>129</sup>

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1400K/Pdt/1980.

Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) yaitu Putusan MA No.1440K /Pdt/1980. Putusan MA tersebut antara lain menyatakan bahwa Kantor Catatan

---

<sup>129</sup> Wagianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Mut'ah dan Sirri Dalam Perspektif Politik Hukum Islam*, Semarang ; Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro. h.19

Sipil saat itu diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Kasus ini bermula dari perkawinan yang hendak di catatkan oleh Andy Vonny Gani P. (perempuan/Islam) dengan Andrianus Patrus Hendrik Nelwan (laki-lak/Kristen).<sup>130</sup> Yang pencatatan pernikahannya ditolak oleh pihak KUA dan Kantor Catatan Sipil. Putusan MA menyatakan bahwa dengan pengajuan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil, maka Andy Vonny telah memilih untuk perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama islam. Dengan demikian, Andy Vonny memilih untuk mengikuti agama Andrianus, maka Kantor Catatan Sipil harus melangsungkan dan mencatatkan perkawinan tersebut.<sup>131</sup>

2) Lydia Kandou dan aktor Jamal Mirdad

pada tahun 1986, peristiwa ini menjadi kontroversial, karena perbedaan agama. Lydia Kandou yang beragama kristen dan Jamal Mirdad beragama Islam. Namun pasangan tersebut nekad menikah di Indonesia dan memperjuangkan status mereka di Pengadilan Negeri. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1986 tersebut begitu menggemparkan.

Jamal Mirdad dan Lydia Kanou mengajukan permohonan ke Kantor Urusan Agama namun upaya ditolak oleh KUA, sehingga Kantor Catatan Sipil dituju sebagai jalan tengah tak pula bisa dilalui mereka dengan lancar, namun upaya Jamal Mirdad dan Lydia Kandou tidak berhenti sampai disitu mereka menempuh jalur pengadilan, dari hal itu Hakim Endang Sari Kawuryan mengizinkan mereka menikah dengan izin itu, pada tanggal 30 Juni 1986, Jamal dan Lyidia resmi menikah.

---

<sup>130</sup> Abdul Syukur dan Tim Hukumonline.com, *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Di Indonesia*, Cet. 1. Jakarta : Lentera Hati., h.63

<sup>131</sup> *Ibid*

- 3) Perkawinan pesulap Dedy Curbozer (Kristen) dan istrinya Calina (Islam).
- 4) Andy Vonny Gani P (Islam) dan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan yang (Protestan).

Mereka mendatangi KUA tanah abang Jakarta, mengajukan permohonan agar perkawinan mereka dapat dilangsungkan menurut agama Islam, namun KUA menolak permohonan tersebut karena adanya perbedaan agama. Kemudian keduanya menghadap Kantor Catatan Sipil namun Kantor Catatan Sipil juga menolaknya. Oleh karena itu KUA dan Kantor Catatan Sipil menolak melangsungkan pernikahan mereka, maka akhirnya mereka mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan penetapan No.382/Pdt/1986/PN.JK.PST, tanggal 11 April 1986 menolak permohonan mereka dan menguatkan penolakan KUA dan Kantor Catatan Sipil.

### **3. Pencatatan Pernikahan bagi Pasangan Beda Agama**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam ayat berikutnya ditetapkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan : pertama, perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya pihak-pihak yang melakukan perkawinan adalah sah, dan kedua, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>132</sup>

---

<sup>132</sup>Jaih Mubarak, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung; Simbiosis Rekatama Media h.67

Pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa :

- 1) Bagi yang beragama Islam pencatatannya oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.
- 2) Bagi mereka yang bukan Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Pengaturan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia saat ini disinggung dalam pasal 35 huruf a jo. Penjelasan pasal 35 Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”).<sup>133</sup> Berikut beberapa pasal UU Adminduk Pasal 34 UU Adminduk mengenai pencatatan perkawinan.

**Pasal 34 UU Adminduk :<sup>134</sup>**

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

---

<sup>133</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt528d75d7/masalah-pencatatanperkawinan-bedaagama> diakses pada tanggal 12 Juli 2018.

<sup>134</sup>Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil*, (Bandung: Fokusmedia, 2011), h.23.



- (3) Kutipan akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kec.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

**Pasal 35 UU Adminduk<sup>135</sup> :**

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan: dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dikawinkan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

**Penjelasan Pasal 35 huruf a.<sup>136</sup>**

Yang dimaksud dengan Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama, sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan dapat dilihat dalam

---

<sup>135</sup> *Ibid* h.24

<sup>136</sup> *Ibid* ., h.77

penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk yaitu, perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.<sup>137</sup> Jika perkawinan beda agama tersebut antara pasangan agama Islam dan non-Islam, maka jelas pencatatannya dilakukan di KCS. Akan tetapi bagaimana dengan perkawinan beda agama di mana salah satu mempelainya beragama Islam. Untuk itu kita dapat merujuk pada pengaturan yang terdapat pada peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP9/1975)

Pada Pasal 2 ayat (1) PP 9/1975 dikatakan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang-Undang No.32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (yaitu KUA). Melihat dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hanya perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam yang dicatatkan di KUA. Ini berarti perkawinan beda agama, jika dilakukan dengan penetapan pengadilan, dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.<sup>138</sup>

---

<sup>137</sup> Abdul Syukur dan Tim Hukumonline.com, *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia*, (Tangerang: Literarti, 2014), h.66

<sup>138</sup> *Ibid*

## BAB IV ANALISIS

### A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Beda Agama di Indonesia

Analisis pernikahan beda agama menurut hukum Islam di Indonesia berarti menjelaskan tentang dasar hukum nikah beda agama menurut perundang-undangan, kemudian dianalisis menurut hukum Islam.

Menurut sejarah hukum keluarga di Indonesia, pada awalnya perkawinan beda agama disebut dengan istilah perkawinan campuran, landasan hukumnya terdapat pada ketentuan pasal 1 GHR (*Regeling of de Gemengde Huwalijen Staatsblaad 1898 No.158*) yang menjelaskan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, termasuk nikah beda agama karena berlainan agama (*interreligeus*). Dalam pasal 7 ayat (2) GHR yang menjelaskan bahwa perbedaan agama, bangsa atau asal sama sekali bukan menjadi penghalang perkawinan.

Berdasarkan bunyi pasal diatas, dapat dipahami bahwa perkawinan campuran menurut UU perkawinan menunjuk pada perbedaan kewarganegaraan Indonesia dengan kewarganegaraan asing, bukan perbedaan agama. Hal ini berakibat bahwa sejak keluarnya UU perkawinan No.1 tahun 1974, aturan tentang tidak di perbolehkannya nikah beda agama berlaku.<sup>139</sup> Pemberlakuan nikah beda agama selanjutnya terdapat dalam hukum agama masing-masing, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) menjelaskan

---

<sup>139</sup> Muhammad Anshary, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah –Masalah)*, Yogyakarta pustaka Pelajar, hlm.49-51

bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”.

Walaupun persoalan pernikahan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan tidak dijelaskan secara tekstual, namun apabila dipahami pasal tersebut menjelaskan bahwa peran hukum agama berkedudukan sebagai pramameter, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung dari hukum agama. Apabila dalam hukum agama menyatakan sahnya perkawinan, maka sah juga menurut hukum negara.

Hukum Islam telah mengatur pernikahan untuk pemeluk agama Islam, tentang pernikahan beda agama yaitu:

1. Keputusan majelis Tarjih muhammadiyah ke 22 tahun 1989 di Malang Jawa Timur menjelaskan bahwa menurut hukum Islam, pernikahan wanita non muslim dengan laki-laki muslim adalah haram. hal ini mengandung arti bahwa pernikahan beda agama dalam segala bentuknya tidak diperbolehkan.<sup>140</sup>
2. Pasal 40 poin (c) dan pasal 44 KHI inpres No.1/1991, menamakan perkawinan beda agama dengan sebutan perkawinan antar pemeluk agama. Pada pasal 40 poin (c) KHI menyatakan bahwa dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang wanita yang tidak beragama Islam.
3. Munculnya permasalahan hukum tentang nikah beda agama, menurut UU perkawinan No.1 Tahun 1974 ternyata telah dijelaskan dalam pasal 8 huruf (f) “ perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin”. Jadi menurut

---

<sup>140</sup> Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, *Dokumen Himpunan Majelis Tarjih Muhammadiyah 22 di Malang Jawa Timur*, hlm.8

UU perkawinan menjelaskan bahwa pernikahan beda agama termasuk pernikahan yang dilarang.

4. Pasal 118 KHI yang menjelaskan bahwa murtad dapat digunakan sebagai alasan perceraian, adanya murtad mesti disebabkan oleh nikah beda agama. Perumus KHI yang berkedudukan sebagai mujtahid berpendapat bahwa penetapan dilarangnya nikah beda agama bertujuan untuk membentuk kemaslahatan, demi mempertahankan agama. Mereka lebih memprioritaskan kepentingan agama daripada kenikmatan jiwa manusia nya dan menempatkan pemeliharaan kepentingan agama sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.<sup>141</sup>

Nikah beda agama, menurut hukum Islam tidak diperbolehkan karena menyangkut perbedaan keimanan. Berdasarkan fatwa MUI Nomor: 4/MUNAS VII/MU/8/2005 yang di cetuskan pada hasil musyawarah Nasional ke II pada tanggal 26 Mei sampai dengan 1 Juni 1980 yang menetapkan bahwa nikah beda agama hukumnya haram, alasannya<sup>142</sup> adalah :

- a. al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 yang menjelaskan bahwa diharamkan laki-laki muslim menikah dengan wanita tidak muslim sehingga mereka beriman. Selain itu juga menjelaskan bahwa diharamkan bagi wali menikahkan wanita yang berada dibawah tanggung jawabnya dengan laki-laki non Islam.
- b. al-Qur'an surat Al-Mumtahanah ayat 10 menjelaskan, supaya laki-laki beriman tidak mempertahankan pernikahannya dengan wanita non Islam, begitu juga

---

<sup>141</sup> Faiq Thobroni, "Kawin Beda Agama Dalam Legeslasi Hukum Perkawinan Indonesian Perspektif HAM", *Al-Mawardi Journal Islamic Law*, Vol.XI. No.2, September-Januari 2011, Yogyakarta h.169.

<sup>142</sup> Jaih Mubarak, 2015, *Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media, h.119.



wanita non muslim supaya dikembalikan kepada laki-laki muslim, karena perkawinan mereka diharamkan oleh Allah.

- c. al-Qur'an surat Al-Tahrim ayat 6 memerintahkan supaya orang-orang beriman menjaga dan memelihara diri sendiri dan keluarganya dari api neraka.
- d. Sabda Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam Al-Thabarani yang mengajarkan bahwa nikah itu setengah dari ajaran agama. Dan kita diperintahkan untuk hati-hati terhadap sisanya.
- e. Sabda Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Ibn.Al-Sura'i yang mengajarkan tentang pentingnya pengajaran pendidikan agama bagi orangtua kepada anaknya.

Penjelasan dari alasan hukum di atas dapat dipahami bahwa :

- a. Nikah beda agama dalam segala bentuknya dilarang
- b. Wali perempuan (ayah, kakek, dan saudara dari kerabat laki-laki) dilarang menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki non muslim.
- c. Wali perempuan (ayah, kakek dan saudara dari kerabat laki-laki) dilarang mempertahankan perkawinan beda agama anak perempuan dengan laki-laki non muslim, karena hubungan batin pasangan tersebut menurut hukum Islam termasuk perbuatan zina sebab perkawinannya sudah tidak sah lagi.
- d. Bagi umat Islam, dianjurkan tidak melakukan nikah beda agama, apabila melakukan nikah beda agama hendaknya sesuai dengan hukum Islam demi menjaga dan menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka.

- e. Para orang tua hendaknya mengajarkan kepada anaknya supaya mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, sehingga tidak melakukan nikah beda agama yang melanggar ketentuan Islam.

Peneliti dalam skripsi ini melihat hukum Islam seperti yang di uraikan dalam landasan teori bagaimana perbedaan pendapat ulama dalam pernikahan beda agama yang dilakukan oleh seorang laki-laki muslim hendak menikahi wanita ahli kitab. Perbedaan itu terbagi menjadi tiga golongan, yaitu diperbolehkan, haram dan pendapat yang lebih mudhorat mengemukakan hukum asalnya halal. Menurut jumhur ulama yang memperbolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab secara mutlak, baik perempuan dari Bani israil maupun bukan Bani Israil adapun yang menguatkan pendapat jumhur yaitu ada tiga dalil sebagai berikut:

- a. Karena dalil-dalil yang ada dalam masalah ini adalah dalil yang mutlak, tanpa ada taqyyid (pebatasan atau persyaratan) dengan suatu syarat tertentu. Dalil yang memperbolehkan laki-laki menikahi perempuan ahli kitab yang tidak menyebutkan bahwa mereka harus dari kalangan Bani Israel. Yang tetera dakam Al-qur'an surat Al-Maidah ayat 5. Dengan ini jelas bahwa ahli kitab itu tidak hanya dari keturunan Bani Israel saja melainkan siapa saja yang beragama Yahudi dan Nasrani baik dia keturunan Bani Israel maupun tidak.
- b. Karena tindakan Rasulullah saw dalam memperlakukan ahli kitab seperti menerapkan kewajiban membayar jizyah atas mereka, menunjukan bahwa yang menjadi kriteria seseorang yang digolongkan ahli kitab adalah agamanya, bukan nenek moyangnya.

- c. Ayat-ayat al-Qur'an yang turun untuk pertama kalinya dalam berbicara kepada orang yahudi dan nasrani pada jaman Nabi saw sudah menggunakan panggilan atau sebutan “ahli kitab” untuk mereka. Padahal mereka pada saat itu sudah menyimpang dari agama asli mereka bukan orang-orang yang masih menjalankan ajaran kitabnya yang murni atau asli.

Berdasarkan tiga dalil diatas jelaslah bahwa jumhur ulama yang memperbolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab baik itu dari Bani Israil maupun bukan dari Bani Israil. Namun yang perlu peneliti tegaskan sesuatu yang mengandung banyak (mubah) itu jelas bukan sesuatu yang dianjurkan (sunnah) atau yang diharuskan (wajib). Bahkan perkara yang hukumnya mubah pada kasus-kasus tertentu dapat dihramkan secara syar'i jika menimbulkan bahaya (mudhorot), meski hukum pokoknya yang mubah tetap ada dan tidak hilang. Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang laki-laki menikahi perempuan ahli kitab hukum asalnya mubah namun dalam kasus tertentu hukumnya menjadi haram.

Menurut pendapat yang menyatakan halal dengan dalil surat Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Ma'idah ayat 5 yang berbunyi :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْحَصْنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصْنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya : “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan

*makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi”*

al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ  
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ  
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ  
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”

## **B. Pandangan Hak Asasi Manusia terhadap Pernikahan Beda Agama**

Dalam pandangan HAM Pernikahan Beda Agama di Indonesia adalah masyarakat yang *plural*. Artinya, terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan kepercayaan. Hal ini menimbulkan berbagai dampak sosial salah satunya tentang perkawinan. Dalam hal ini, dampak sosial berusaha ditekan dengan munculnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan unifikasi dari seluruh hukum pernikahan yang ada di Indonesia. Permasalahan kemudian muncul, ketika

pembatasan pernikahan atas dasar UU ini pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”*.

UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM di Indonesia, terdapat penjelasan tentang kebebasan beragama, juga terdapat kebebasan untuk menikah dan meneruskan keturunan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Akan tetapi dalam ayat selanjutnya dinyatakan bahwa perkawinan yang ditentukan menurut UU. Dengan demikian, hak untuk melaksanakan perkawinan dibatasi oleh UU Perkawinan. Sementara dalam Pasal 2 UU Perkawinan, perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal tersebut sering dianggap sebagai pelarangan terhadap perkawinan beda agama, karena perkawinan harus dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sedangkan tidak mungkin satu perkawinan dilaksanakan dengan dua upacara agama. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan perkawinan beda agama salah satu pihak hendaknya mengikuti agama pihak lain. Dapat disimpulkan bahwa kebebasan beragama di Indonesia belum dapat terlaksana sepenuhnya, karena telah terjadi pemaksaan oleh institusi perkawinan terhadap seseorang untuk memeluk agama tertentu guna melaksanakan perkawinan.

HAM diartikan memberi kebebasan untuk melakukan pernikahan tanpa memandang agama. Hal ini bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan harus dilakukan sesuai dengan agama masing-masing. Penjelasan atas



UU ini kemudian diperkuat dengan adanya UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM.. Dalam pasal 50 UU ini, tercantum klausa bahwa *“Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.”*

Dalam tataran yuridis, sebuah Negara yang telah meratifikasi suatu instrument HAM memiliki suatu kewajiban untuk melaksanakan aturan tersebut. Namun demikian, terdapat kebebasan dalam ratifikasi yang memberikan peluang dalam hukum untuk dapat diaplikasikan dalam sistem hukum suatu Negara. Dengan adanya pengertian tersebut, maka secara yuridis, tidak menjadi suatu masalah ketika UU No. 39 Tahun 1999 serta UU No. 1 Tahun 1974 yang berbeda dari DUHAM sebagai instrumen dasar HAM.

Tataran yuridis tersebut harus mampu dijelaskan dalam tataran filosofis tentang HAM, mengingat DUHAM sendiri hanya merupakan kodifikasi rasional umat manusia atas HAM. Begitu pula UU No. 39 Tahun 1999, dan UU No 1 Tahun 1974 bahkan UUD 1945. Dalam tataran filosofis, pengertian atas hak serta pernikahan itu sangat penting artinya. Pengertian HAM dalam kajian ini terdapat dua kubu penting, pertama menurut konsepsi internasional yang kedua menurut konsepsi Islam.

Dalam konsep Internasional, doktrin sepakat menyatakan bahwa HAM merupakan hak kodrati yang dimiliki oleh umat manusia karena derajatnya yang tinggi sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sedangkan dalam konsep Islam, HAM ditempatkan berdasar ketuhanan, umumnya diwujudkan dengan penghormatan terhadap orang lain dalam bentuk kewajiban untuk tidak melakukan penghilangan

daripadanya. Dalam pengertian kedua konsep tersebut terdapat beberapa persamaan, yang pertama HAM ada untuk manusia karena Tuhan. Dengan demikian, fungsi kodrati bahwa HAM melekat pada seluruh umat manusia menjadi jelas, karena setiap manusia adalah ciptaan Tuhan. Lebih lanjut, secara eksplisit pengertian HAM dalam dunia internasional atas dasar pengertian tersebut, akhirnya juga menyepakati bahwa HAM merupakan pemberian Tuhan serupa dengan konsepsi HAM dalam Islam.

Pernikahan sendiri dalam DUHAM berdasar rasionalisme dan liberal menghasilkan paham sekuler yang berusaha memisahkan dunia dengan agama yang menghasilkan bebasnya perkawinan beda agama. Berbeda dengan konsep Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan dilaksanakan karena hak untuk nikah sendiri diberikan oleh Tuhan. Maka menurut Islam, kapan, siapa, dimana, bagaimana, kenapa seseorang itu melakukan pernikahan adalah hak Tuhan untuk menetapkan mana yang akan diserahkan pada manusia dalam kepengurusannya.

Penjabaran makna pernikahan dalam DUHAM sendiri kemudian menjadi tidak relevan ketika mengingat dasar filosofis pengadaannya. Bahwa DUHAM mengakui adanya Tuhan pemberi hak tersebut.

### **C. Persamaan dan Perbedaan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pernikahan Beda Agama**

Menurut hemat penulis, Persamaan dari pandangan keduanya tentang nikah beda agama yaitu sama-sama menghargai nikah beda agama karena nikah termasuk sarana untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia diatas bumi.

Sedangkan perbedaanya yaitu di dalam Hukum Islam sudah jelas diterangkan dalam Q.S al-Baqarah ayat 221, bahwa nikah beda agama itu tidak diperbolehkan (dilarang) karena menyangkut perbedaan keimanan, kepercayaan, dan keyakinan. Selain itu Islam mengakui pernikahan yang sah itu adalah antara laki-laki muslim dengan wanita muslim atau seiman. Sedangkan dalam HAM diperbolehkannya melakukan pernikahan beda agama merupakan hak prerogatif pasangan calon suami istri yang sudah dewasa. Hal ini dijelaskan pada pasal 10, dan 50 UU No. 36 Tahun 1999. Kewajiban negara adalah melindungi, mencatatkan dan menerbitkan akte perkawinannya. Namun sayangnya realitas ini tidak cukup disadari oleh negara, bahkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun KHI tidak memberi tempat bagi perkawinan beda agama.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

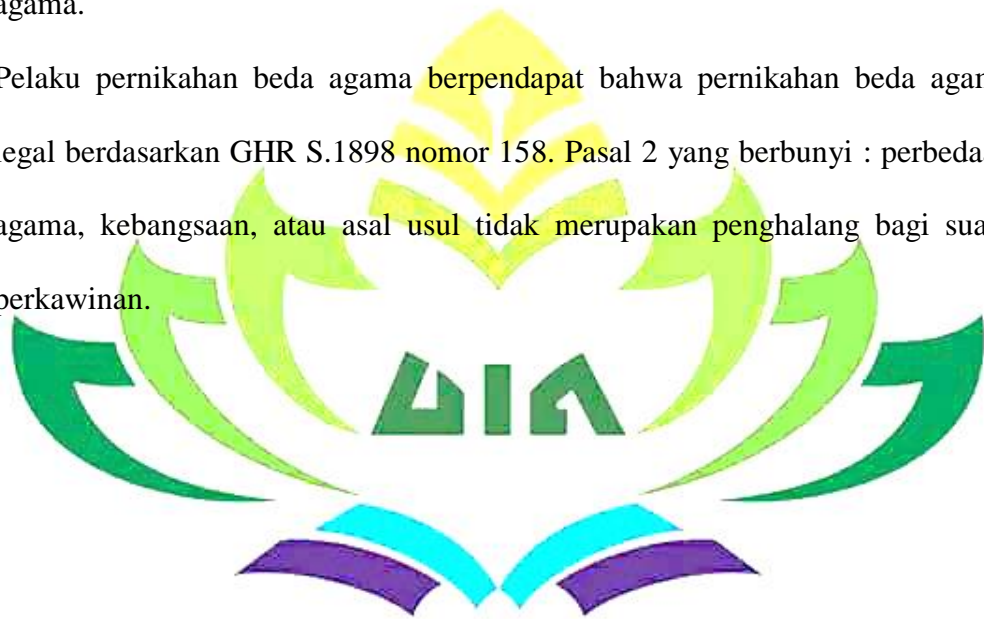
Setelah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka bab ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pernikahan beda agama dalam pandangan Hukum Islam diharamkan, serta beberapa ulama sepakat melarang adanya pernikahan beda agama karena menyangkut perbedaan keimanan.
2. Pandangan HAM tentang perkawinan beda agama juga melarang dan tidak memberi tempat bagi perkawinan beda agama, karena semua hak dan kebebasan yang terumus dalam deklarasi tunduk pada syari'at atau Hukum Islam, satu-satunya ukuran mengenai Hak Asasi Manusia, adalah syari'at Islam.
3. Persamaan dan pandangan keduanya yaitu sama-sama menghargai nikah beda agama karena nikah termasuk sarana untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia diatas bumi. Perbedaannya yaitu dalam Islam pernikahan beda agama pada dasarnya dilarang, sedangkan dalam HAM diperbolehkan nya melakukan pernikahan beda agama merupakan hak prerogatif pasangan calon suami istri yang sudah dewasa.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas maka disarankan :

1. Pernikahan beda agama diharamkan didalam hukum Islam oleh sebab itu, perlu adanya suatu respon positif dari para ulama untuk semakin meningkatkan syiar Islam mengenai haramnya pernikahan beda agama.
2. Pandangan hukum positif terhadap pernikahan beda agama bahwa pernikahan beda agama bertentangan dengan norma-norma yang ada di Indonesia oleh sebab itu penegak hukum harus memiliki ketegasan terhadap pernikahan beda agama.
3. Pelaku pernikahan beda agama berpendapat bahwa pernikahan beda agama legal berdasarkan GHR S.1898 nomor 158. Pasal 2 yang berbunyi : perbedaan agama, kebangsaan, atau asal usul tidak merupakan penghalang bagi suatu perkawinan.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, IAIN Raden Intan Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M, 2015.
- Al-Asqalani Imam Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Marom*, Semarang; Dahara Prize, 2014.
- Al-Anshary, Abu Yahya Zakariya, *Fath al-Wahhab*, Singapura: Sulaiman Mar'iy,t,t.juz 2.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997.
- At-Thabari, jami Ibn Jarir' *al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran*, Muassah Ar-Risalah, 2000. III: 711-173.
- Bahder, Nasution Johan, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Bandung : Sumbersari Indah 40222.
- Bidin, Masri Elmahsyar, *Prinsip Hubungan Muslim dan Non Muslim dalam Pandangan Islam*.
- Bakker , Anton, dan Zubair A Charis, *Metodelogi Penelitian filsafat*, Yogyakarta: Kansius, 1992.
- Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana perdana Media Group, 2012.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung; Pustaka setia, 2000.
- Jeremy Bentham dikutip dalam bukunya K.M Smith Rhona dan Njal Hostmaelingen, *Hukum HAM*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Junaidi, Dedi, *Bimbingan perkawinan membina keluarga sakinah menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta: Akademi pressindo, 2003.
- Kadar M.Yusuf, *Tafsir ayat ahkam*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Komarudin, *metode penulisan skripsi dan thesis* Bandung:angkasa, 2002.
- Maimun, *Metode Penemuan Hukum dan Implementasinya pada Kasus-Kasus Hukum Islam*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2015.

Ramulyo, Moh, Idris. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara, Cct. V, 2004.

Ridha, Rasyid 1367 H, *Tafsir Al-manar*, Kairo Dar Al-Manar

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Said Aqil Husni Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluraritas Sosial*, Jakarta:Penamadani, 2005.

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Bandung; CV Pustaka setia, 2013.

Salim Peter, dan Yenni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1999.

Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga*, rev.ed. jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Sutrisno, Adi, *Metodelogi Riset*, Yogyakarta: Gajah Mada University press, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid I*, Logos Wacana Ilmu, jakarta, 1997.

Syakur, Abd dan Tim, [hukumonline.com](http://hukumonline.com), *Tanya jawab tentang nikah beda agama menurut hukum islam di indonesia* Tangerang: Lentera hati, cct.1, 2014.

Tihami dan Sohrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta : PT RajaGrafindo, 2009.

Usamah, Abu Hafish, *Panduan Lengkap Nikah dari "A" sampai "Z"*., Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, 2006.

Wagianto, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Mut'ah dan sirri dalam Perspektif Politik Hukum"*, Semarang : Disertai Program Doktor Ilmu Hukum. Universitas Diponegoro, 2010.

Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet.ke-3, edisi kedua, 1994.

Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung CV. Diponegoro, . 2015.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Jakarta Sinar Grafika, 2000, cet. Ke-2.

Undang-Undang Dasar R.I Tahun 1945, Surakarta: Pustaka Mandiri..

Jurnal Al-Adalah Vol.12, No. 2 (2015) *Penegakan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam.*

<http://hukumonline.com/detail.asp?idz=156&cl=Berita> di akses pada tanggal 30 April 2018

<http://www.kompas.com> /di akses pada tanggal 30 April 2018.

Deni K. Yusup, Kodifikasi UU No.39 Tahun 1999, dimuat dalam <http://dkyusup.blogspot.com/2008/04/kodifikasi-uu-no-39-tahun-1999>.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline Versi 1.1 Freeware*, 2010 by Ebta Setiawan dengan mengacu pada data dari KBBI Daring (edisi III) di ambil dari <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/>.

M.Quraish Shihab, *M.Quraish Shihab menjawab – 1001 soal KeIslaman yang Dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu*

Bab 3 *Pengertian, Macam dan Jenis Hak Asasi Manusia / Ham Yang Berlaku Umum*, tersedia <http://www.organisasi.org/1970/01/pengertian-macam-dan-jenis-hak-asasi-manusia-ham-yang-berlaku-umum-global-pelajaran-ilmu-ppkn-pmp-indonesia.html>, diakses pada tanggal 05 April 2018 pukul 16:53 WIB.

Wikipedia, *Pemikiran Tokoh Klasik dalam Kelahiran dan Perkembangan Liberalisme Klasik dan Perkembangan Liberalisme Klasik*, di muat dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/liberalisme>, di akses pada tanggal 30 April 2018 Dimuat dalam artikel berjudul *Pendapat Para Ahli tentang HAM di website* <http://nalhackerblog.blogspot.com/2010/03/pendapat-para-ahli-tentang-ham.html>, akses pada tanggal 30 April 2018

4.

